



**DETERMINAN PENENTU KEMISKINAN  
PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA  
SEMARANG TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Jesi Puspita Sari**

**7111415030**

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pembimbing



Yuda S.E., M.Sc

NIP. 198502162008122004



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc  
NIP. 198701222014041001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 06 Desember 2019

Penguji I

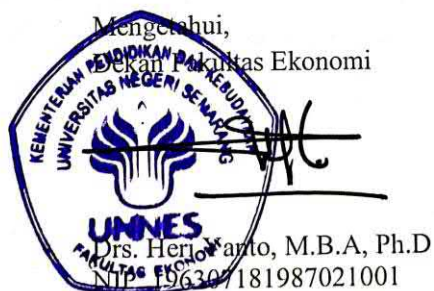
Prof. Dr. Sucihatiningsih DWP., M.Si  
NIP. 196812091997022001

Penguji II

Dr. Y. Titik Haryati., M.Si  
NRP. 195206222017072248

Penguji III

Yozi Aulfa Rahman, S.E., M.Sc  
NIP. 198701222014041001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jesi Puspita Sari  
NIM : 7111415030  
Tempat, Tanggal, Lahir : Kabupaten Semarang, 25 Juni 1997  
Alamat : Perumahan Griya Manunggal Sejahtera No.218 Desa  
Karang Tengah, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 25 September 2019



Jesi Puspita Sari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Tidak usah dipikirkan jalani saja, karna bagian terberat dari melakukan sesuatu adalah memikirkann secara berlebihan.*

*-Fiersa Bersari-*

### Persembahan

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak dan Ibu serta kakaku yang senantiasa dirahmati Allah SWT, telah memberikan doa, semangat, hiburan, dan dukungan kepada saya.*
- 2. Bapak dan Ibu dosenku, yang senantiasa dirahmati Allah SWT, terimakasih atas ilmu dan bimbingannya.*

## SARI

**Sari, Jesi Puspita.** 2017. "Determinan Penentu Kemiskinan Perempuan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang". Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing, Yozi Aulia Rahman.

**Kata kunci: Kemiskinan Perempuan, Status Rumah Tangga, Logit Biner.**

Jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Dimana jumlah penduduk Kota Semarang jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi dibandingkan laki-laki. Kemiskinan berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, dan tingkat kesehatan yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut perlunya kegiatan atau aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran perempuan bekerja yang berstatus sebagai istri maupun janda sebagai penentu status ekonomi perempuan yang ditinjau dari variabel dalam rumah tangga yaitu jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, beban tanggungan, status rumah tangga, tingkat pendidikan dan kesehatan.

Data yang digunakan berupa *raw* data Susenas Kota Semarang tahun 2017 dan menggunakan metode Regresi Logit Biner dengan menggunakan analisis SPSS. Sampel yang digunakan adalah penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas berstatus istri atau janda di Kota Semarang yang bekerja. Jumlah sampel sesuai dengan jumlah responden dari Susenas tahun 2017 yang berjumlah 848 penduduk.

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa perempuan yang bekerja yang berstatus miskin sebanyak 48,5% dari total penduduk perempuan. Perempuan yang berstatus miskin didominasi yang bekerja di sektor informal dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan berstatus sebagai kepala rumah tangga dengan pendidikan yang rendah. Uji Regresi biner menunjukkan bahwa jam kerja, tingkat pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap penentu status ekonomi perempuan. Kemudian pada variabel status pekerjaan, beban tanggungan, status rumah tangga berpengaruh positif signifikan terhadap penentu status ekonomi perempuan di Kota Semarang pada tahun 2017. Sedangkan lapangan pekerjaan tidak berpengaruh terhadap penentu status ekonomi perempuan di Kota Semarang tahun 2017.

Hal tersebut perlunya upaya untuk meningkatkan atau mengkaji kembali sudah kebijakan yang sudah dijalankan, misalnya seperti subsidi kualitas layanan pendidikan bagi perempuan yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Kemudian perlu adanya kesempatan bagi perempuan bekerja dalam sektor formal, serta kebijakan lain seperti jaminan sosial, program raskin dan bantuan tunai yang mengarah untuk kepala keluarga perempuan sehingga akan mengurangi kemiskinan bagi perempuan.

## ABSTRAK

**Sari, Jesi Puspita.** 2017. "Determinants of Women's Poverty in Households in City of Semarang in 2017". Final Project. Departement of Development Economics. Semarang State University. Advisor, Yozi Aulia Rahman.

**Keywords: Women's Economic Status, Household Status, Binary Logit.**

Large population is one of the causes of poverty. Where the population of the city of Semarang is more female population than men. Poverty is associated with low income, illiteracy, and low levels of health. To overcome this, the need for more productive economic activities or activities. This study aims to find out the role of working women with the status of wives and widows as a determinant of women's economic status in terms of socioeconomic variables in the household, namely hours of work, employment, employment status, dependents, household status, education and health levels .

The data used from the National Social Economic Survey (Susenas) Semarang City raw data for 2017 and using the Binary Logit Regression method using SPSS analysis. The sample used was female population aged 15 years and over who were working as wives or widows in Semarang City. The number of samples is in accordance with the number of respondents from Susenas in 2017, amounting to 848 residents.

This study found that working women who were poor were 48.5% of the total female population. Poor women are predominantly employed in the informal sector with working hours less than 35 hours a week and are heads of households with low education. Binary Regression Test shows that working hours, education level, and health have a significant negative effect on determining the economic status of women. Then on the variable employment status, dependents, household status significantly positive effect on the determinants of women's economic status in the city of Semarang in 2017. While employment does not affect the determinants of the economic status of women in the city of Semarang in 2017.

It is necessary for efforts to improve or reassess policies that have been implemented, for example such as quality service subsidies for women aged 15 years and over. Then there needs to be opportunities for women to work in the formal sector, as well as other policies such as social security, the Raskin program and cash assistance that leads to female family heads so that it will reduce poverty for women.

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Determinasi Penentu Status Ekonomi Perempuan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017”.

Peyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak berupa saran, bimbingan, maupun petunjuk dan bantuan dalam bentuk lain, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rohman M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Negeri ini.
2. Bapak Drs. Heri Yanto, Mba.,Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di FE Unnes.
3. Ibu Fafurida, S.E., M.Sc, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan izin mengadakan penelitian ini.
4. Bapak Yozi Aulia Rahman, S.E.,M.Sc., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi ini
5. Ibu Prof. Dr. Suci Hartiningsih Dian Wisika Prajanti., M.Si., Dosen Penguji 1 yang memberikan kritik dan saran dalam penelitian ini.
6. Ibu Dr. Y. Titik Haryati., M.Si., Dosen Penguji 2 yang memberikan kritik dan saran dalam penelitian ini.



7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi selama penulis menimba ilmu di Unnes.
8. Bapak Sentot Bangun Widoyono, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin penelitian di instansi yang dipimpin.
9. Kedua orang tuaku tercinta serta kakaku yang senantiasa dirahmati Allah SWT, telah memberikan doa, semangat, hiburan, dan dukungan kepada saya.
10. Mas Nindya Adi H dan Mbak Titis yang telah memberikan masukan dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Adifa, Paradita, Lusi, Anjaria, Nida, Dian, Yoga dan Biq yang telah menghibur dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2015 dan Hima Ekonomi Pembangunan yang telah menjadi keluarga kedua penulis di Semarang.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang ada. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya, lembaga, Masyarakat, dan pembaca.

Semarang, 25 November 2019

Jesi Puspita Sari

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PEMBAHASAN .....	v
SARI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	21
1.3. Cangkupan Masalah .....	23
1.4. Rumusan Masalah .....	23
1.5. Tujuan Penelitian .....	25
1.6. Manfaat Penelitian .....	26
1.7. Orisinalitas Penelitian .....	26
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA .....	28
2.1. Kajian Teori Utama ( <i>Grand Teory</i> ) .....	28
2.1.1. Kemiskinan .....	28
2.1.2. Teori Pekerja Wanita .....	41
2.2. Kajian Variabel Penelitian .....	42
2.3. Penelitian Terdahulu .....	50

2.4. Perbedaan dan Persamaan Penelitian .....	55
2.5. Kerangka Berfikir .....	56
2.6. Hipotesis .....	58
BAB III METODE PENELITIAN .....	59
3.1. Desain dan Jenis Penelitian .....	59
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	62
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	63
3.4. Metode Analisis Data .....	63
3.4.1. <i>Logistic Regression</i> Model .....	64
3.4.2. Uji Statistik .....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	70
4.1. Gambaran Kependudukan Kota Semarang .....	70
4.2. Gambaran Kemiskinan Kota Semarang .....	71
4.3. Gambaran Ketenagakerjaan Kota Semarang .....	72
4.4. Hasil Penelitian .....	73
4.4.1. Gambaran Umum Data .....	73
4.4.2. Analisis Deskriptif .....	75
4.4.3. Analisis Statistik .....	85
4.4.3.1. Uji Wald .....	87
4.4.3.2. Uji LR Statistik .....	91
4.4.3.3. Uji McFadden R-Square .....	92
4.4.3.4. Uji Goodnes Fit .....	93
4.4.3.5. Odds Ratio.....	93
4.4.4. Pembahasan .....	95
4.4.4.1. Pengaruh Jam Kerja terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	95
4.4.4.2. Pengaruh Lapangan Pekerjaan terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	96
4.4.4.3. Pengaruh Status Pekerjaan terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	98

4.4.4.4. Pengaruh Beban Tanggungan terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	99
4.4.4.5. Pengaruh Status Rumah Tangga terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	100
4.4.4.6. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	101
4.4.4.7. Pengaruh Kesehatan terhadap Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	103
BAB V PENUTUP.....	104
5.1. Kesimpulan .....	104
5.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	108
LAMPIRAN.....	112

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Perempuan Usia Produktif Kota di Jawa Tengah ....	10
Tabel 1.3 Presentase Perempuan Usia 15 Tahun ke atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2013-2017 .....	14
Tabel 1.4 Presentase Status Pekerjaan Utama Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja .....	18
Tabel 4.1 Indikator Kemiskinan Kota Semarang tahun 2013-2017 .....	73
Tabel 4.2 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Kota Semarang tahun 2013-2017 .....	74
Tabel 4.3 Karakteristik Responden .....	73
Tabel 4.4 Hasil Output Penentu Status Ekonomi Perempuan .....	87
Tabel 4.5 <i>Variables in the Equation</i> .....	88

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar . 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2013 – 2017 .....	3
Gambar . 1.2 Jumlah Penduduk Miskin se-Kota Jawa Tengah 2016 – 2017 .....	7
Gambar . 1.3 Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kota Semarang .....	8
Gambar . 1.4 Presentase Angka Melek Huruf Perempuan Berdasarkan Usia 15 Tahun ke Atas (%) .....	13
Gambar . 1.5 Presentase TPAK Perempuan dan Laki – laki berdasarkan Usia Tahun ke Atas .....	16
Gambar . 1.6 Presentase Jam Kerja Selama Seminggu Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja .....	19
Gambar . 1.7 Rata-rata Upah Sebulan Penduduk 15 Tahun ke Atas Sebagai Buruh/Karyawan .....	20
Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan versi R.Nurkse (1953) .....	28
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Peneliti .....	58
Gambar 4.1 Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2017 (Jiwa) .....	72
Gambar 4.2 Presentase Persebaran Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Tahun 2017 .....	77
Gambar 4.3 Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Jam Kerja Tahun 2017 .....	78
Gambar 4.4 Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Tahun 2017 .....	79
Gambar 4.5 Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Status Pekerjaan Pekerjaan Tahun 2017 .....	80
Gambar 4.6 Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Beban Tanggungan	

	Tahun 2017 .....	82
Gambar 4.7	Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Status Rumah Tangga Tahun 2017 .....	83
Gambar 4.8	Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017 .....	84
Gambar 4.9	Presentase Ketenagakerjaan Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Semarang Berdasarkan Kesehatan Tahun 2017 .....	85

## DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1. Konsep dan Definisi Operasional Variabel .....	115
Lampiran 2. Hasil Olah Regresi Logit Biner .....	118
Lampiran 3. Surat Ijin Observasi .....	125
Lampiran 4. Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) BPS .....	126



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

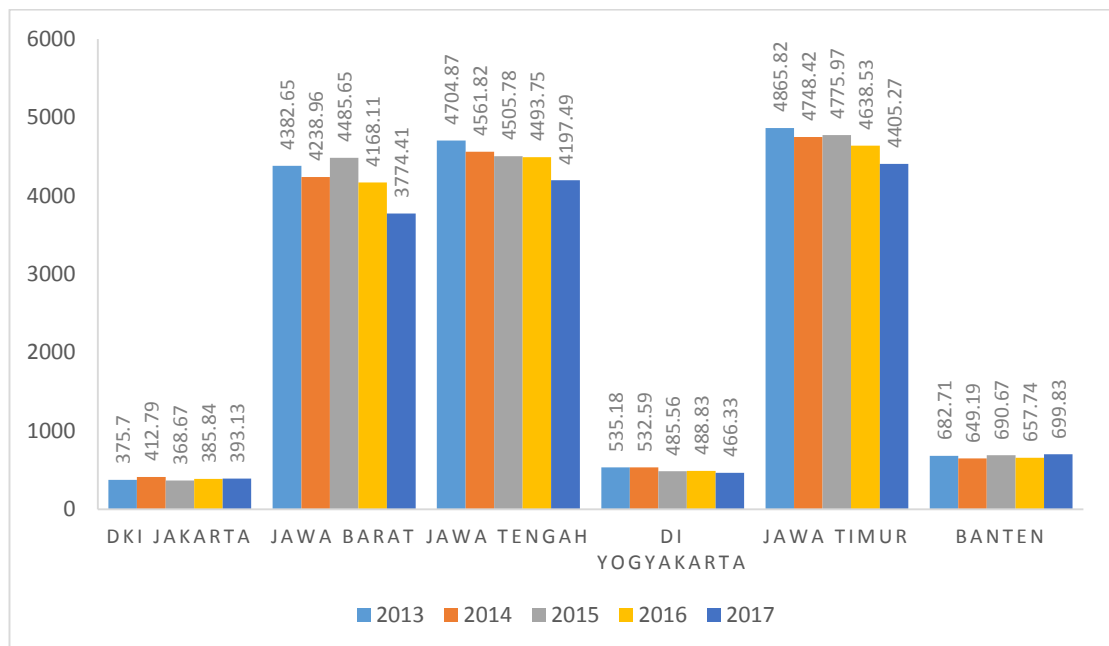
Kemiskinan merupakan salah satu masalah cukup besar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun termasuk negara berkembang seperti Indonesia ini. Jika masalah ini terus berlarut – larut dan dibiarkan maka akan semakin parah. Kemiskinan yang ada di negara Indonesia terbilang sulit untuk diatasi pemerintah hal tersebut dikarenakan kemiskinan yang terstruktur dan secara kultur yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi miskin (Krisnawati, 2016). Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar - benar terjadi karena ada suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya pada saat krisis ekonomi, selain itu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tingkat pendidikan, kesehatan, dan segala kemampuan Sumber Daya Manusia yang mampu digunakan untuk proses produktifitas.

Kemiskinan itu sendiri diartikan sebagai seseorang yang dipandang tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan untuk sehari-hari. Hal ini di disebabkan beberapa penyebab salah satunya yaitu rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh. Menurut Bank Dunia (2004), kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, tingkat kesehatan yang rendah, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup.

Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya yang tidak memadai. (Krisnawati, 2016). Salah satu hal terpenting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi penduduk miskin tersebut. Pengukuran kemiskinan dapat dilakukan melalui Badan Pusat Statistika (BPS) dengan melakukan survei. Menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut BPS (2008) pendekatan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis garis kemiskinan dibangun dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 hasil dari Badan Pusat Statistika (BPS) tercatat bahwa salah satu penyumbang penduduk miskin di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah dengan posisi nomor dua setelah Jawa Timur dapat kita lihat melalui Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa tahun 2013 - 2017  
Sumber : Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan hasil dari Suvei Sosial Ekonomi tercatat bahwa kondisi ekonomi di Pulau Jawa pada provinsi berbeda-beda pada tiap tahunnya. Jika dilihat berdasarkan tahun terakhir pada tahun 2017 salah satu penyumbang terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Tengah dengan menduduki posisi nomor dua setelah Jawa Timur Setelah itu posisi selanjutnya yaitu provinsi Jawa Barat dan diikuti Banten dan DI Yogyakarta dan terakhir DKI Jakarta.

Meskipun Angka kemiskinan di Jawa Tengah terjadi berfluktuatif cenderung turun dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2013-2014 dan pada tahun

2015 kembali naik namun pemerintah mampu menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2016-2017. Hal tersebut tentu menjadi upaya pemerintah juga untuk lebih bekerja keras untuk lakukan melalui program – program kebijakan dalam pengentasan kemiskinan baik di Jawa Tengah maupun di Pulau Jawa Lainnya.

Besarnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk. Seperti pada penelitian Puspita (2015) mengatakan bahwa variabel populasi atau jumlah penduduk signifikan positif terhadap kemiskinan. Jumlah penduduk yang bertambah akan meningkatkan suatu kemiskinan. Kota Semarang merupakan penyumbang jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah hal tersebut bisa kita lihat berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini :

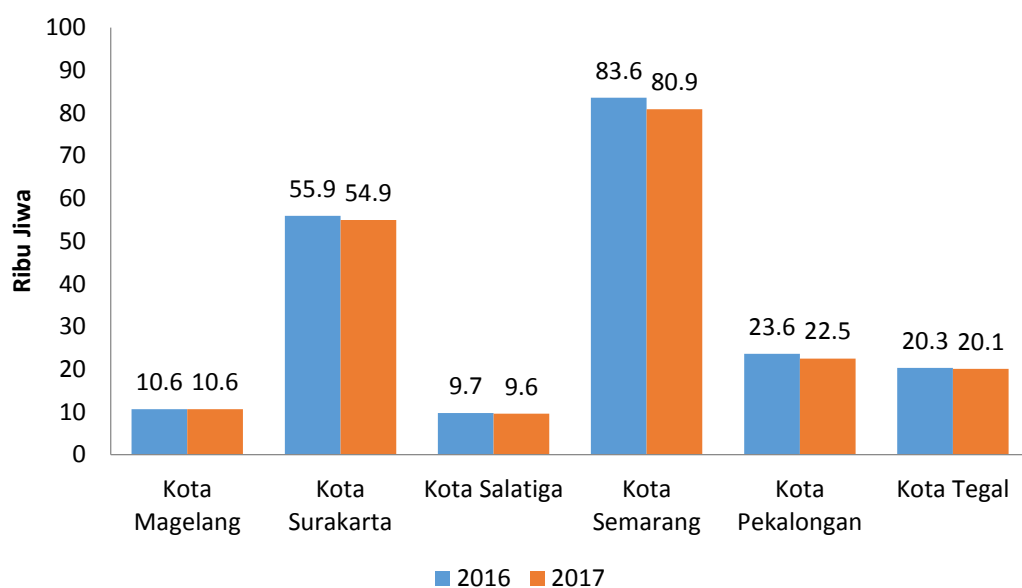
**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin**

Provinsi	Laki-laki (%)					Perempuan (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Jawa Tengah	32,99	33,24	33,49	33,73	33,97	33,52	33,77	34,04	34,28	34,53
Kab. Cilacap	5,09	5,08	5,07	5,06	5,05	4,99	4,98	4,97	4,96	4,92
Kab. Banyumas	4,86	4,87	4,88	4,89	4,90	4,79	4,80	4,81	4,82	4,82
Kab. Purbalingga	2,64	2,62	2,65	2,66	2,69	2,65	2,66	2,67	2,68	2,69
Kab. Banjarnegara	2,70	2,70	2,70	2,69	2,69	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64
Kab. Kebumen	3,57	3,54	3,52	3,49	3,49	3,52	3,51	3,49	3,48	3,47
Kab. Purworejo	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,13	2,12	2,12	2,10	2,10
Kab. Wonosobo	2,36	2,36	2,35	2,35	2,34	2,26	2,26	2,25	2,25	2,24
Kab. Magelang	3,72	3,72	3,73	3,74	3,75	3,63	3,64	3,65	3,65	3,66
Kab. Boyolali	2,84	2,84	2,83	2,83	2,82	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87
Kab. Klaten	3,42	3,41	3,40	3,38	3,37	3,49	3,48	3,47	3,46	3,44
Kab. Sukoharjo	2,55	2,55	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,57
Kab. Wonogiri	2,78	2,76	2,75	2,73	2,73	2,89	2,88	2,87	2,85	2,84
Kab. Karanganyar	2,52	2,52	2,53	2,53	2,54	2,53	2,54	2,56	2,55	2,55
Kab. Sragen	2,59	2,58	2,57	2,56	2,59	2,65	2,64	2,64	2,62	2,61
Kab. Grobogan	4,01	4,00	3,99	3,98	3,97	4,03	4,02	4,01	4,00	4,00
Kab. Blora	2,52	2,51	2,50	2,50	2,49	2,56	2,55	2,54	2,53	2,53
Kab. Rembang	1,85	1,84	1,84	1,84	1,84	1,82	1,82	1,82	1,83	1,83
Kab. Pati	3,59	3,57	3,57	3,56	3,55	3,74	3,73	3,73	3,73	3,72
Kab. Kudus	2,42	2,43	2,44	2,46	2,47	2,45	2,47	2,48	2,49	2,50
Kab. Jepara	3,56	3,51	3,54	3,56	3,59	3,45	3,48	3,50	3,53	3,55
Kab. Demak	3,29	3,30	3,31	3,32	3,33	3,29	3,30	3,31	3,32	3,33
Kab. Semarang	2,90	2,92	2,94	2,95	2,96	2,95	2,97	2,99	3,01	3,03
Kab. Temanggung	2,22	2,23	2,23	2,24	2,24	2,18	2,18	2,19	2,19	2,19
Kab. Kendal	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
Kab. Batang	2,21	2,21	2,22	2,22	2,22	2,18	2,18	2,19	2,19	2,19
Kab. Pekalongan	2,59	2,59	2,59	2,59	25,91	2,58	2,58	2,58	2,58	2,57
Kab. Pemasang	3,84	3,82	3,81	3,79	3,77	3,85	3,84	3,82	3,81	3,79
Kab. Tegal	4,26	4,25	4,23	4,21	4,19	4,24	4,23	4,21	4,19	4,17
Kab. Brebes	5,38	5,36	5,34	5,33	5,31	5,24	5,22	5,21	5,19	5,17
Kota Magelang	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Kota Surakarta	1,50	1,49	1,49	1,48	1,48	1,56	1,55	2,13	1,54	1,54
Kota Salatiga	0,54	0,53	0,54	0,54	0,49	0,54	0,55	0,55	0,56	0,56
Kota Semarang	<b>4,89</b>	<b>4,93</b>	<b>4,98</b>	<b>5,03</b>	<b>5,07</b>	<b>5,08</b>	<b>5,05</b>	<b>5,12</b>	<b>5,14</b>	<b>5,19</b>
Kota Pekalongan	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Kota Tegal	0,73	0,73	0,73	0,73	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

Sumber : BPS, 2013-2017

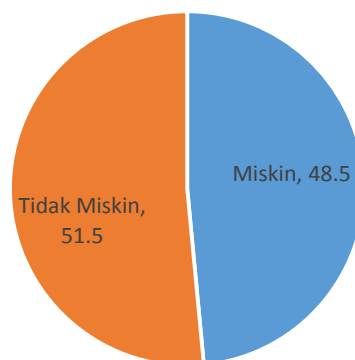
Berdasarkan data yang diambil melalui BPS, jika dilihat tahun terakhir pada tahun 2017 diketahui Kota Semarang menduduki posisi pertama terbesar di Jawa Tengah untuk Kota Semarang sebesar 861.994 Jiwa Laki-laki dan sebesar 895.692 Jiwa Perempuan, jumlah penduduk perempuan lebih mendominasi daripada jumlah penduduk laki-laki.

Dalam segi mata pencaharian penduduk, penduduk kabupaten umumnya bergerak dalam bidang pertanian atau bersifat agraris, sementara penduduk perkotaan bergerak dalam perdagangan dan jasa. Sedangkan dalam pembuatan kebijakan pembangunan daerah, prioritas di pemerintah daerah kabupaten akan berbeda dengan pemerintah daerah kota (BPS, 2007). Pada data ditemukan bahwa Kota Semarang yang merupakan Ibukota dari Jawa Tengah merupakan penyumbang terbesar jika di bandingkan dengan Kota di Jawa Tengah hal tersebut bisa kita lihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin se-Kota Jawa Tengah Tahun 2016-2017)  
Sumber : BPS Kota Semarang

Jika dibandingkan dengan kota-kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang menjadi salah satu penyumbang nomor satu terbesar penduduk miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat bahwa pada tahun terakhir 2017 Kota Semarang penduduk miskin di Jawa Tengah jika dibandingkan pada tahun 2016 Kota Semarang terdapat selisih 2,7 Ribu Jiwa penduduk, artinya pemerintah Kota Semarang mempunyai peluang besar dalam menurunkan angka kemiskinan yang lebih besar lagi. Tahun sebelumnya pada tahun 2015 penduduk miskin di Kota Semarang dengan perubahan hanya sebesar 0,7 ribu jiwa penduduk. Sedangkan pada tahun 2014 penduduk miskin di Kota Semarang dengan perubahan sebesar 0,4 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2013 penduduk miskin di Kota dengan perubahan sebesar 2 ribu jiwa.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Perempuan Miskin Kota Semarang  
Sumber : Susenas, 2017

Berdasarkan gambar persentase penduduk perempuan miskin di Kota Semarang pada tahun 2017 yang didapat berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tercatat bahwa adanya perbandingan jumlah masing-masing dimana perempuan miskin di Kota Semarang sejumlah 48,5 persen, artinya hal tersebut

perlunya ditingkatkan kembali evaluasi perbaikan kebijakan untuk semakin mengurangi angka kemiskinan pada perempuan di Kota Semarang.

Selain hal tersebut menurut Sa'diyah & Arianti (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkaitan juga dengan : distribusi pendapatan, tingkat upah bersih, akses terhadap barang dan jasa atau produksi tenaga kerja, kesempatan tenaga kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia) lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah satu dari upayanya kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan dalam perekonomian tetapi juga kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau keancaman kekerasan.

Kemudian menurut Todaro (2006) bahwa mayoritas penduduk miskin di negara-negara berkembang diisi oleh kaum perempuan dan anak-anak. Kaum perempuan dan anak-anak inilah yang paling menderita karena kurangnya gizi, dan kurangnya mendapatkan layanan kesehatan, hal inilah yang menyebabkan kemiskinan. Pada penelitian Javed & Asif (2011) yang mengatakan bahwa rumah tangga yang berkepala keluarga perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan jika dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Hal tersebut juga dibenarkan oleh penelitian Nopriansyah (2015) mengatakan bahwa resiko rumah tangga dengan berjenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Untuk mencegah atau mengurangi kemiskinan perempuan dapat dilakukan dengan salah satunya dengan pemberdayaan



perempuan. Seperti pada hasil penelitian dari Abdourahman (2010) mengatakan bahwa dengan mengurangi beban kerja perempuan dalam aktivitas rumah tangga, dapat memberikan peluang untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya bekerja dengan memberikan gaji atau upah. Hal tersebut pastinya akan memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan akan meningkatnya kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan di semua tingkat. Hal ini juga akan memberdayakan perempuan dan membuat perempuan mendapatkan haknya, serta dapat aktif untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Jumlah penduduk perempuan usia produktif di Kota Semarang termasuk dalam salah satu penduduk terbesar di Kota Se-Jawa Tengah, bisa kita lihat berdasarkan Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Perempuan Usia Produktif di JawaTengah

Provinsi	2014	2015	2016	2017
Kota Magelang	42.917	43.079	43.307	43.466
Kota Surakarta	189.715	190.806	191.810	192.711
Kota Salatiga	65.758	66.783	67.807	68.778
<b>Kota Semarang</b>	<b>621.623</b>	<b>633.260</b>	<b>644.530</b>	<b>655.934</b>
Kota Pekalongan	102.031	103.215	104.391	105.520
Kota Tegal	85.928	86.498	87.052	87.520

Sumber : BPS, Jawa Tengah

Berdasarkan hasil Sakernas jumlah penduduk perempuan usia produktif di Kota Semarang cukup besar jika dibandingkan dengan Kota lainnya dikarenakan penduduk di Kota Semarang lebih banyak yaitu sebanyak 655.934 Jiwa pada tahun 2017. Namun terkadang pekerjaan produktif yang dikerjakan oleh laki – laki dianggap sebagai pekerjaan karena dibayar dan menghasilkan (uang) dan memiliki jam kerja yang jelas. Sementara itu, pekerjaan domestik yang dilakukan

perempuan tidak diartikan sebagai pekerjaan karena tidak dibayar dan tidak menghasilkan materi, serta memiliki jam kerja yang tidak terbatas karena dikerjakan sepanjang waktu. Alokasi waktu yang tidak seimbang antara perempuan dan laki – laki ini adalah proses pemiskinan bagi kaum perempuan. Padahal dengan memberikan upah terhadap perempuan akan mengurangi angka kemiskinan.

Dengan meningkatkan peran kaum perempuan dalam memenuhi kebutuhan segala kehidupan sehari-hari rumah tangganya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan kegiatan ekonomi, hal tersebut merupakan perwujudan dari keberhasilan emansipasi (Krisnawati & Yasa, 2016). Dengan adanya aktivitas ekonomi bagi kaum perempuan akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebuah rumah tangga. Menurut Djunaedi (2018) peran kaum perempuan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga yaitu menambah penghasilan suami dan pendapatan keluarga, belanja sehari-hari, biaya sekolah untuk anak – anaknya, dan juga sebagai tabungan untuk kebutuhan menjaga kesehatan keluarga.

Banyak faktor – faktor yang menyebabkan seseorang miskin, salah satunya adalah dari segi tingkat pendidikan, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Alinea IV. Selain dengan pendidikan menurut Shiddiqoh (2016) mengatakan bahwa salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan yaitu

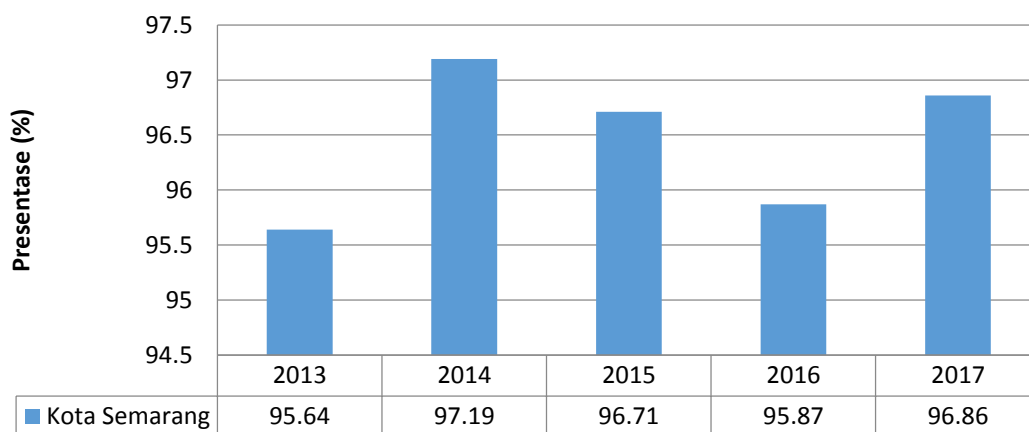
pada pengambilan modal manusia terutama dalam kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

Menurut Todaro (2006) dalam bukunya menyatakan bahwa untuk mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita sangat menguntungkan secara ekonomis karena peningkatan pendidikan kaum wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya di lahan pertanian dan pabrik tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak setelah itu karena kaum wanita memikul beban terbesar dari kaum kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara berkembang, maka dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadahi.

Melalui pendidikan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Dengan adanya pendidikan yang semakin tinggi diharapkan akan mengurangi atau menurunkan angka tingkat kemiskinan. Salah satu ukuran atau indikator yang paling dasar dalam menghitung tingkat pendidikan dapat dilihat berdasarkan Angka Melek Huruf. Angka Melek Huruf merupakan kemampuan membaca dan menulis (BPS, 2016). Umumnya orang-orang yang mampu membaca tulis memiliki status ekonomi sosial, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang baik. Di Kota Semarang bisa kita lihat bahwa AMH dari tahun ke tahun 2013-2017 telah mengalami peningkatan namun pada tahun

2016 Kota Semarang telah mengalami penurunan. hal tersebut bisa kita lihat

Gambar 1.3.



Gambar 1.4 Presentase Angka Melek Huruf Perempuan Berdasarkan usia 15 Tahun ke atas (%)

Sumber : BPS 2013-2017, diolah

Angka Melek Huruf Perempuan usia 15 tahun keatas di Kota Semarang mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif dimana pada tahun 2013 sampai 2014 tercatat masing - masing sebesar 9,64 persen dan naik menjadi 97,19 persen. Namun pada tahun 2014 hingga 2016 Angka Melek Huruf perempuan terjadi penurunan yaitu 96,71 persen pada tahun 2015 kemudian turun lagi menjadi 95,87 persen di tahun 2016. Namun pada tahun terakhir yaitu tahun 2017 Angka Melek Huruf di Kota Semarang terjadi peningkatan sebesar 96,86 persen. Bila dibandingkan dengan kondisi Provinsi di Jawa Tengah terlihat bahwa angka melek huruf di Kota Semarang jauh lebih tinggi dari Provinsi di Jawa Tengah. Jika dilihat dilihat berdasarkan tahun terakhir angka melek huruf di Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 90,5 persen jauh dibawah Kota Semarang.

Namun dengan meningkatnya angka melek huruf perempuan pada tahun 2017 ternyata belum diimbangi dengan jumlah pendidikan terakhir yang

ditamatkan tahun 2017 padahal hal tersebut merupakan salah satu dari indikator pendidikan. Hal ini bisa kita lihat melalui tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Presentase Perempuan Usia 15 Tahun ke atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan tahun 2013 -2017 Kota Semarang

Keterangan	Perempuan (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak/belum pernah sekolah	11,28	11,06	11,55	6,42	9,29
Tidak tamat SD	18	17,78	16,65	19,01	17,63
SD/MI	31,02	30,82	31,28	37,23	29,94
SMP/MTS	18,07	17,68	18,35	14,06	19,23
SM/SMA	16,06	16,61	16,02	16,61	17,57
Perguruan Tinggi	5,57	5,85	6,16	6,67	6,35

Sumber : Susenas 2016 -2017, diolah

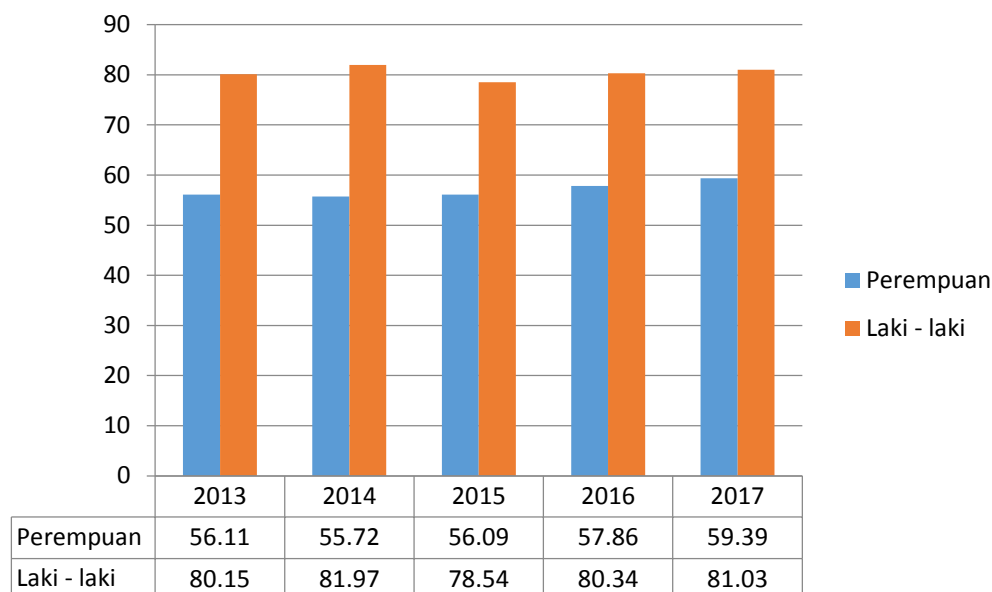
Berdasarkan data yang diperoleh pada hasil Survei Sosial Ekonomi telah dapat kita lihat bahwa dari tahun 2013 ke tahun 2017 perempuan telah mampu meningkatkan akses pendidikan. Hal ini terlihat angka tidak atau belum pernah pada tahun 2013-2016 presentase angka pada jenjang Perguruan Tinggi mulai meningkat walaupun yaitu sebesar 6,67% pada tahun 2016 dan penduduk perempuan tidak atau belum pernah sekolah menurun sebesar 6,42 persen. Artinya adanya kesadaran perempuan dalam pentingnya pendidikan sehingga akan mampu memperoleh kehidupan yang layak yaitu dengan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan data menunjang perekonomian.

Namun jika kita lihat berdasarkan tahun terakhir yaitu tahun 2017 angka tidak/belum pernah sekolah kembali meningkat yaitu 9,29 dan pada tamatan jenjang tertinggi Perguruan Tinggi justru menurun yaitu sebesar 6,35%. Dari pembahasan yang sebelumnya terlihat bahwa presentase atau jumlah penduduk

miskin di Jawa Tengah masih tinggi nomor dua dari enam pulau di Jawa. Padahal tingkat pendidikan perempuan di Jawa Tengah meningkat. Oleh sebab itu, perlunya dilacak faktor – faktor lain yang menyebabkan presentase penduduk miskin di Jawa Tengah, khususnya ditinjau dari aktivitas ekonomi perempuannya.

Dengan adanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK akan dapat mengidentifikasi seberapa besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diukur dengan menggunakan presentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dengan ukuran atau indikator tersebut menunjukkan besaran yang relatif dari pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Secara langsung naik turunnya faktor – faktor produksi akan memberikan dampak terhadap tinggi rendahnya suatu faktor permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Menurut Noerdin (2006) mengatakan bahwa dalam akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja terlihat ada kecenderungan perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja lebih kecil jumlahnya daripada laki – laki. Sementara itu, bagi perempuan yang mencoba memasuki pasar tenaga kerja, ternyata juga memiliki kemungkinan yang kecil untuk memperoleh pekerjaan dibanding dengan laki – laki. Hal ini dapat kita lihat gambar ini.



Gambar 1.5 Presentase TPAK Perempuan dan Laki – laki berdasarkan usia 15 tahun ke atas

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik terlihat bahwa terdapat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kota Semarang pada tahun 2013 – 2017 naik setiap tahunnya dengan besaran masing-masing 56,11 persen pada tahun 2013 kemudian terjadi penurunan di tahun 2014 menjadi 55,72 persen dan terjadi kenaikan kembali untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang pada tahun 2015, pada tahun 2016 TPAK Kota Semarang kembali naik hingga tahun 2017.

Namun perbandingan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih sangat jauh terlihat kesenjangan antara laki – laki dan perempuan di Kota Semarang Tingginya disparitas antara perempuan dengan laki-laki dalam akses pasar tenaga kerja di Kota Semarang ini bisa disebabkan karena beberapa hal yaitu pertama perempuan mempunyai beban ganda karena bekerja di luar rumah dan tetap harus bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga sampai

mengasuh anak kedua ketika ingin bekerja di luar rumah, perempuan yang belum menikah pada umumnya harus mendapatkan izin dari orang tua dan yang sudah menikah harus mendapatkan izin dari suami. Sehingga menyebabkan perempuan kesulitan untuk memasuki lapangan pekerjaan, sekaligus perempuan masuk dalam pasar pekerjaan perempuan menduduki pekerjaan dengan tingkat yang rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam penelitiannya Krisnawati (2016) mengatakan bahwa masih banyak terdapat perempuan yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar atau tidak mendapatkan upah. Kemudian lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya perempuan yang memasuki pasar kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan lebih kecil dari pada laki – laki. Hal ini bisa dilihat status pekerja utama perempuan di Kota Semarang melalui tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.4 Presentase Status Pekerjaan Utama Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Tahun	Jenis Kelamin	Status Pekerjaan Utama				
		Berusaha sendiri	Berusaha Dibantu Buruh	Pegawai/ Buruh/Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja tak Dibayar
2017	Laki – laki	17.40	22.03	37.43	18.41	4.72
	<b>Perempuan</b>	<b>21.68</b>	<b>14.89</b>	<b>35.86</b>	<b>7.64</b>	<b>19.92</b>
2016	Laki-laki	14.18	26.01	34.90	18.63	6.28
	<b>Perempuan</b>	<b>18.46</b>	<b>15.63</b>	<b>34.67</b>	<b>7.18</b>	<b>24.07</b>
2015	Laki-laki	14.53	26.25	34.83	18.91	5.48
	<b>Perempuan</b>	<b>16.31</b>	<b>14.39</b>	<b>34.57</b>	<b>7.39</b>	<b>24.76</b>

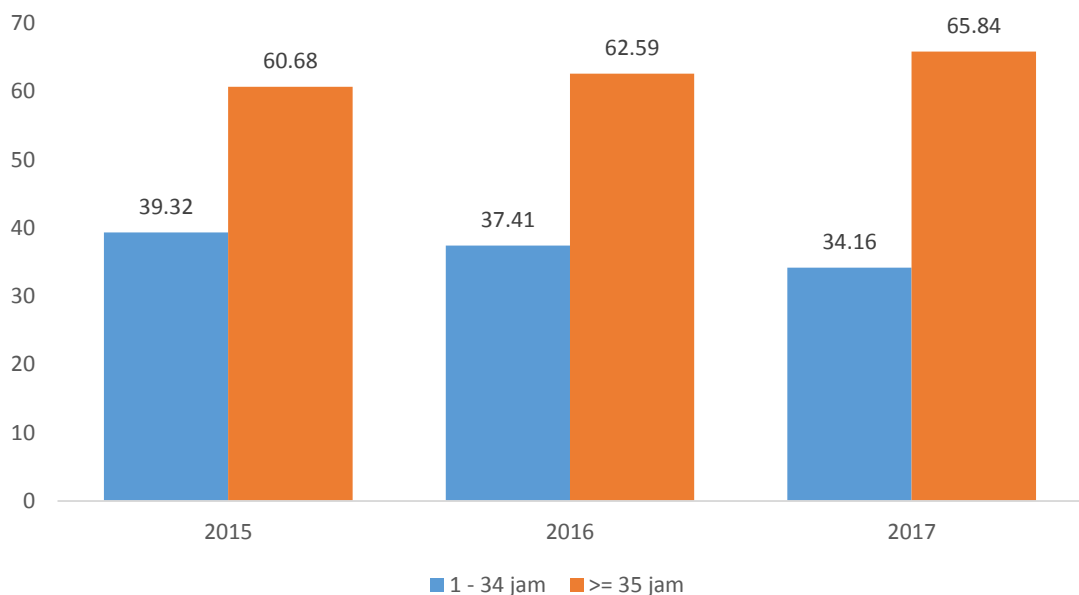
Sumber : BPS, 2015-2017

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perempuan selalu menjadi peyumbang pada posisi pekerjaan yang rendah. Pada kategori



Pegawai/buruh/karyawan perempuan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga pada tahun 2017. Kemudian pada posisi pekerja tak dibayar walaupun pada tahun 2015 sampai 2017 telah mengalami penurunan namun pada posisi tersebut penyumbang terbanyak dari kategori tersebut adalah perempuan. Hal ini perlunya upaya pemerintah dalam mengatasi tersebut.

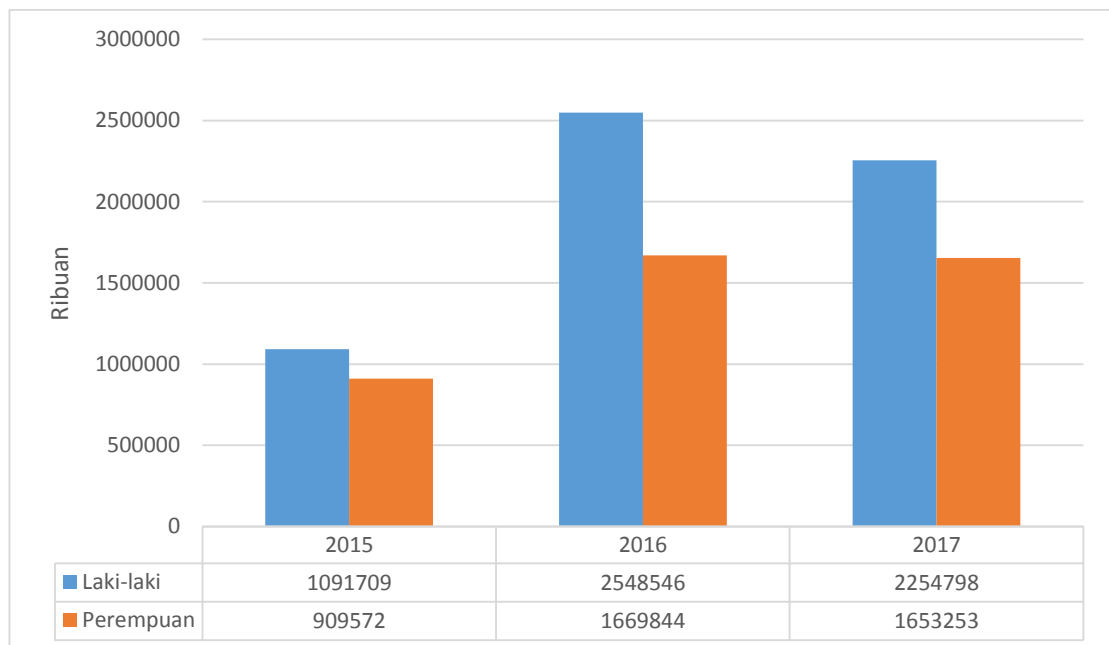
Selain itu juga alokasi waktu atau jam, kerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki – laki, tapi secara ekonomi penghasilan laki – laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan produktif, reproduktif dan fungsi – fungsi sosial di komunitas. Perempuan selalu melakukan ketiga tanggung jawab tersebut secara bersamaan, sedangkan laki – laki hanya bertanggung jawab atas pekerjaan produktif saja.



Gambar 1.6 Presentase Jam Kerja Selama Seminggu Penduduk Perempuan Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Sumber : BPS-Susenas, 2015-2017

Berdasarkan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik diketahui jam kerja penduduk perempuan dari tahun 2015-2017 pada 1-34jam justru mengalami penurunan. Terjadi peningkatan pada jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Namun jika dilihat berdasarkan pada upah perempuan mengalami kesenjangan terhadap laki-laki hal ini bisa kita lihat berdasarkan gambar 1.9.



Gambar 1.7 Rata – rata Upah Sebulan Penduduk 15 Tahun ke Atas Sebagai Karyawan/Buruh

Sumber : BPS, 2015-2017

Berdasarkan data yang telah diperoleh dapat kita lihat rata – rata upah sebulan perempuan usia 15 tahun ke atas terjadi peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 namun pada tahun 2017 telah mengalami penurunan. dan jika kita amati pada tabel 1.2 perbandingan antara presentase perempuan dan laki- laki hampir sama namun rata – rata upah yang didapat perempuan cenderung rendah. Jam

kerja yang tinggi terhadap perempuan hal ini salah satu yang menyebabkan perempuan miskin.

Menurut Indraswari (2009) mengatakan bahwa adanya diskriminasi dalam hal pengupahan terhadap pekerja perempuan. Diskriminasi upah tersebut dilakukan secara terbuka ataupun juga terselubung. Diskriminasi ini antara perempuan dan laki mendapatkan upah pokok yang sangat berbeda dalam hal pekerjaan yang sama. Diskriminasi yang terselubung dilakukan terhadap pembayaran komponen tunjangan. Pekerja laki –laki yang berstatus menikah mendapat tunjangan keluarga (istri anak) sedangkan pekerja perempuan yang berstatus menikah dianggap lajang

Partisipasi wanita dalam bidang kegiatan ekonomi dapat menjadi solusi dikarenakan yaitu dengan perubahan pandangan dan sikap masyarakat akan pentingnya arti pendidikan bagi kaum perempuan maupun laki – laki serta makin sadar akan pentingnya kaum perempuan ikut peran atau berpartisipasi dalam hal pembangunan (Haryanto, 2008). Selanjutnya adanya kemauan untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu mampu berusaha untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari- hari dan membiayai kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi kaum perempuan bekerja dalam bidang publik semakin tinggi.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yaitu pada tahun 2017 banyaknya penduduk miskin

di Pulau Jawa terutama pada Jawa Tengah menduduki posisi ke dua setelah Jawa Timur. Kemudian pada penelitian Agustina (2019) mengatakan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi jumlah kemiskinan Kota Semarang menjadi salah satu penyumbang terbesar jumlah penduduk yang besar yaitu mencapai 895.692 Jiwa pada tahun 2017. Puspita (2015) juga mengatakan bahwa kemiskinan di kota memiliki permasalahan yang lebih variatif dari pada kemiskinan di pedesaan.

Kemudian dari segi pendidikan di Angka Melek Huruf di Kota Semarang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa AMH Perempuan telah mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 96,86% dengan perubahan 0,99% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun disisi lain telah terjadi penurunan pada pendidikan yang ditamatkan perempuan dimana pada tahun 2017 angka tidak atau belum pernah sekolah meningkat menjadi 9,29% dan pada perguruan tinggi menurun menjadi 6,35% dari 6,67% pada tahun 2016.

Todaro (2006) juga mengatakan bahwa dengan kondisi ekonomi yang terpuruk tersebut akan dapat menyebabkan perempuan miskin, sebagian besar penduduk didominasi oleh perempuan. Kemudian selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan miskin diantaranya kurangnya gizi, layanan kesehatan yang kurang, selain itu beban ganda perempuan yang tinggi di dalam rumah tangga seperti tetap bekerja di luar rumah dan tetap harus bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah hingga mengasuh anak.

Untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi beban kerja wanita dalam rumah tangga, ataupun memberikan gaji atau upah. Tercatat pada BPS jumlah penduduk perempuan usia produktif di Kota

Semarang pada tahun 2017 mencapai 655.934 Jiwa. Namun terkadang pekerjaan yang dikerjakan laki-laki dianggap sebagai pekerjaan karena dibayar dan memiliki jam kerja yang jelas sedangkan pekerjaan domestik perempuan tidak diartikan sebagai pekerjaan karena tidak dibayar dan memiliki jam kerja yang tidak terbatas karena dikerjakan sepanjang waktu. Apalagi perempuan yang dikatakan *single parent* akan lebih memiliki beban pekerjaan yang lebih berat. Hal tersebut adalah proses pemiskinan perempuan. Padahal dengan memberikan upah terhadap perempuan akan mengurangi angka kemiskinan. Berdasarkan data masih banyak perempuan yang bekerja namun tak dibayar walaupun sudah mengalami kemajuan namun masih banyak dibandingkan dengan perempuan yang bekerja dibayar maupun mempunyai usaha yang dijelaskan.

Sekalipun bekerja perempuan hanya mendapatkan upah buruh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki tercatat bahwa dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan namun tidak sebanding. Kemudian jam kerja yang semakin meningkat menjadi 65,84% pada tahun 2017. Hal tersebut merupakan pemiskinan perempuan.

### **1.3. Cakupan Masalah**

Berdasarkan di atas masalah di atas, peneliti membatasi cakupan permasalahan yang lebih sempit. Permasalahan dalam peneliti difokuskan pada rumah tangga dengan penduduk perempuan yang bekerja dengan usia 15-64 tahun di Kota Semarang tahun 2017 baik berstatus sebagai istri maupun janda.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan data pada tahun 2017 banyaknya penduduk miskin di Pulau Jawa terutama pada Jawa Tengah menduduki posisi ke dua setelah Jawa Timur. Kemudian pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi jumlah kemiskinan (Agustina, 2019) Kota Semarang menjadi salah satu penyumbang terbesar dikarenakan jumlah penduduk yang besar yaitu mencapai 895.692 Jiwa pada tahun 2017 dan didominasi oleh penduduk perempuan. Hal tersebut berarti mengidentifikasi bahwa kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang dijalankan di Kota Semarang belum optimal.

Setelah itu kemiskinan juga terjadi dalam rumah tangga, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan perempuan. Abdourahman (2010) juga mengatakan bahwa dengan mengurangi beban kerja perempuan dalam aktivitas rumah tangga, dapat memberikan peluang untuk kegiatan yang lebih produktif. Berdasarkan data mengatakan bahwa perempuan usia produktif di Kota Semarang cukup besar. Namun disamping itu masih ditemukan data yang banyak perempuan bekerja namun tak dibayar, kemudian bekerja dengan upah yang rendah dan bekerja dalam jam kerja tinggi. Hal tersebut juga merupakan dalam pemiskinan perempuan. Maka dari itu selain hal tersebut peneliti ingin mengetahui faktor lain yang menjadi penyebab perempuan miskin dalam rumah tangga, sehingga muncul pertanyaan penelitian yang dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana pengaruh jam kerja terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?
2. Bagaimana pengaruh lapangan pekerjaan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?
3. Bagaimana pengaruh status pekerjaan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?
4. Bagaimana pengaruh anggota rumah tangga terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?
5. Bagaimana pengaruh status rumah tangga terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?
6. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?
7. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang ?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis adakah pengaruh jam kerja terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh adakah lapangan pekerjaan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis pengaruh adakah status pekerjaan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
4. Untuk menganalisis pengaruh adakah beban tanggungan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.

5. Untuk menganalisis pengaruh adakah status rumah tangga terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
6. Untuk menganalisis pengaruh adakah tingkat pendidikan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
7. Untuk menganalisis pengaruh adakah kesehatan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal pengaruh aktivitas peran perempuan dalam rumah tangga melalui variabel ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan di Kota Semarang.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat membantu dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintah khususnya Bappeda di Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan peran perempuan.

## **1.7. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun orisinalitas dari penelitian ini merupakan pengembangan dari Shiddiqoh (2016) penelitian tersebut menggunakan kemiskinan sebagai variabel dependen dan pendidikan, layanan



kesehatan, dan upah sebagai variabel independen. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel dependen status penentu ekonomi dengan ukuran log kemiskinan dan variabel independen, jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, jumlah anggota rumahtangga, status rumah tangga, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Kemudian dalam penelitian tersebut dilakukan di tiga puluh tiga provinsi Indonesia pada tahun 2008 sampai tahun 2013 menggunakan metode analisis kuantitatif dengan menggunakan panel data dan analisis deskriptif. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota Semarang pada tahun 2017 dengan menggunakan Regresi Logit.

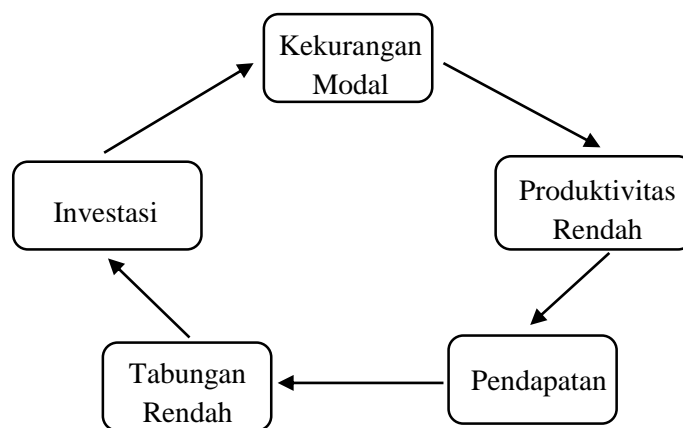
## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

#### 2.1.1. Kemiskinan

##### 2.1.1.1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Salah satu teori kemiskinan, yaitu teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) mengatakan bahwa, suatu negara miskin karena negara itu pada dasarnya memang miskin. Teori ini merupakan konsep yang mengandaikan suatu hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam suasana kemiskinan. Dengan kata lain, lingkaran setan merupakan analogi yang mengumpamakan bahwa kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal ujung, sehingga akan terus berputar pada lingkaran yang sama.



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan versi R.Nurkse (1953)

Sumber : Kuncoro (2003)

Teori ini menyatakan bahwa keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga

menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan (Utomo, 2013).

Teori lingkaran setan kemiskinan selanjutnya diperluas dengan teori "*The Culture of Poverty*" yang pertamakali dikemukakan oleh Oscar Lewis pada tahun 1959 teori ini menjelaskan mengapa kemiskinan terus muncul meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan dijalankan. Orang-orang yang berada dalam budaya kemiskinan memiliki perasaan yang kuat dari keterpinggiran, ketidakberdayaan, ketergantungan, atau merasa tidak memiliki. Mereka seperti orang asing di negara mereka sendiri, lembaga yang ada tidak melayani kepentingan dan kebutuhan mereka (Auerbach, 2011).

Sedangkan Leasiwal (2013) menurut versinya teori lingkaran kemiskinan secara general mengatakan suatu kesamaan, yaitu variabel "X" tertentu yang berperan sebagai penyebab kesinambungan kemiskinan. Variabel yang menjadi penyebab (atau determinan) kemiskinan dan akan muncul kembali sebagai akibat (indikator) dari kemiskinan tersebut, sekaligus memulai lagi putaran kemiskinan yang terus menerus. Beberapa yang paling umum meletakkan faktor-faktor di bawah ini sebagai determinan (dengan pendekatan individu) yaitu rendahnya pendidikan, kualitas kesehatan yang buruk, banyaknya anak adalah intervensi bagi orang miskin, rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya saving (karena pendapatan habis untuk konsumsi).

### **2.1.1.2. Indikator Kemiskinan**

Data kemiskinan yang dihitung berdasarkan dari Survei sosial ekonomi nasional dalam bentuk data makro yaitu berupa perkiraan penduduk miskin di Kota Semarang. adapun indikator yang digunakan yaitu:

1. luas lantai rumah
2. jenis lantai rumah
3. jenis dinding rumah
4. fasilitas tempat buang air besar
5. sumber air minum
6. penerangan yang digunakan
7. bahan bakar yang digunakan
8. frekuensi makan dalam sehari
9. kebiasaan membeli daging/ayam/susu
10. kemampuan membeli pakaian
11. kemampuan berobat ke puskesmas
12. lapangan pekerjaan
13. pendidikan
14. kepemilikan aset

### **2.1.1.3. Teori Penyebab Kemiskinan**

Teori Maxwell School menyatakan bahwa teori penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teori agregat dan teori individual. Teori individual secara rinci menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh individu yang miskin. Terdapat beberapa penyebab

individual tersebut diantaranya adalah level pendidikan dan keterampilan, kesehatan, disability dan usia, orientasi kerja dan budaya kemiskinan, diskriminasi baik gender, ras maupun agama. Teori agregat dibedakan menjadi dua yakni *case aggregate poverty theory* dan *generic poverty theory*. *Chase theory* menyatakan bahwa kemiskinan memang diakibatkan oleh faktor – faktor seperti teori individual, namun secara agregat faktor-faktor – faktor tersebut berpengaruh dimisalkan adalah tingkat pendidikan agregat, kesehatan agregat, atau budaya keseluruhan dalam suatu masyarakat yang menyebabkan produktivitas masyarakat rendah sehingga eksis di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan, *generic theory* menyatakan kemiskinan disebabkan berdasarkan faktor – faktor secara global misalkan seperti : ketersediaan kerja layak yang terbatas, kegagalan pasar, maupun pendapatan nasional yang rendah.

#### **2.1.1.4. Teori Kemiskinan Absolut**

Cangkupan kemiskinan absolut menurut Todaro dan Smith (2006) adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk miskin hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan internasional. Garis tersebut tidak mengenal batas antar Negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau US\$2 per hari dalam dolar PPP.

Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau “hitungan per kepala” (*headcount*),  $H$ , untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut,  $Y_p$ . Ketika hitungan per kepala tersebut dianggap sebagai bagian dari populasi total,  $N$ , maka diperoleh indeks per kepala (*headcount index*),  $H/N$ . Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga dapat ditelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu.

Salah satu strategi praktis untuk menentukan garis kemiskinan lokal adalah dengan menetapkan sekelompok makanan yang cukup, yang didasarkan atas persyaratan nutrisi dari penelitian media tentang kalori, protein, dan makronutrien yang dibutuhkan tubuh. Kemudian, dengan menggunakan data survey rumah tangga lokal, akan dapat diidentifikasi sekelompok makanan yang biasa dibeli rumah tangga yang hampir memenuhi persyaratan nutrisi ini. Kemudian ditambahkan pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan dasar lain, seperti pakaian, tempat tinggal, dan sarana kesehatan, untuk menentukan garis kemiskinan lokal. tergantung pada bagaimana kalkulasi ini dilakukan, garis kemiskinan yang dihasilkan mungkin melebihi US\$1 per hari dalam dolar PPP.

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normative, persepsi mengenai

kesejahteraan. Namun pada saat Negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan, akan berubah (Kuncoro, 2010).

Menurut Todaro & Smith (2006) mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum perempuan. Banyaknya perempuan yang menjadi kepala rumahtangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas perempuan dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap penghasilan suami, merupakan sebab – sebab pokok atas terjadinya fenomena yang sangat memprihatinkan tersebut. Selain itu, akses kaum perempuan ternyata juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, berbagai tunjangan sosial, dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilancarkan oleh pemerintah. Beberapa karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin yang digambarkan oleh Todaro & Smith, (2006) adalah sebagai berikut :

#### 1. Kaum Perempuan dan Kemiskinan

Mayoritas penduduk miskin di dunia adalah kaum perempuan. Jika dibandingkan dengan standar hidup penduduk termiskin di berbagai negara-negara berkembang, akan terungkap fakta bahwa hampir di semua tempat, yang paling menderita adalah kaum perempuan beserta anak-anak. Banyaknya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, rendahnya kesempatan dan kapasitas perempuan dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap penghasilan suami, merupakan sebab-sebab pokok atas terjadinya fenomena yang sangat memprihatinkan

tersebut. Selain itu, akses kaum perempuan ternyata juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak di sektor formal, berbagai tunjangan sosial, dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dilancarkan oleh pemerintah. Kenyataannya ini turut mempersempit sumber-sumber keuangan bagi perempuan, sehingga posisi perempuan secara finansial kurang stabil apabila dibandingkan dengan laki-laki.

Sebagian dari disparitas atau kesenjangan pendapatan antara keluarga-keluarga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan bersumber dari adanya perbedaan pendapatan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan. Selain upah buruh perempuan biasanya lebih rendah (meskipun beban kerjanya sama), perempuan juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berupah tinggi. Di daerah perkotaan-perkotaan sekalipun, kaum perempuan lebih sulit mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan-perusahaan swasta maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Akibatnya, perempuan terpaksa terkungkung dalam bidang-bidang kerja yang berpenghasilan atau yang berproduktivitas rendah. di pedesaan, situasinya sama sekali tidak baik, kaum perempuan juga sulit mendapatkan pekerjaan yang memberikan sejumlah penghasilan secara tetap.

Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan indikator yang tidak bisa diandalkan untuk mengukur tinggi atau rendahnya kesejahteraan seorang karena distribusi pendapatan di dalam keluarga tersebut juga berbeda-beda. Lebih dari itu, sesungguhnya status ekonomi kemiskinan dari



kaum perempuan di kalangan miskin tersebut merupakan sebuah indikator yang lebih baik, karena lebih mampu mencerminkan sejauh mana tingkat kesejahteraan yang ada pada diri kaum perempuan dan anak-anak. Berbagai penelitian tentang alokasi sumber daya dalam setiap rumah tangga menunjukkan secara jelas bahwa di banyak kawasan di dunia, kecukupan gizi, pelayanan kesehatan, taraf pendidikan, dan warisan yang diterima oleh perempuan lebih rendah daripada yang dinikmati oleh kaum laki-laki.

Bias-bias internal atau ketimpangan distribusi pendapatan dalam masing-masing rumah tangga ini banyak dipengaruhi oleh status ekonomi kaum perempuan. Berbagai penelitian mendapati bahwa seandainya sumbangan finansial perempuan di suatu keluarga meningkat atau relatif lebih tinggi, maka diskriminasi yang berlangsung terhadap anak-anak perempuan akan lebih rendah, dan kaum perempuan pun lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan anak-anaknya. Jika pendapatan di keluarga tersebut rendah, maka boleh dikatakan seluruh hasil kerja atau pendapatan sang ibu akan dihabiskan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kecukupan gizi yang dibutuhkan. Akan tetapi, apabila yang bertambah adalah penghasilan sang suami, maka bagian penghasilan keluarga yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi keluarga tidak akan bertambah terlalu banyak.

Kontrol kaum perempuan terhadap penghasilan atau sumber daya keluarga juga relatif masih sangat terbatas karena sejumlah alasan. Alasan yang paling utama adalah kenyataan bahwa sebagian besar pekerjaan yang

dilakukan oleh kaum perempuan tidak memberikan imbalan uang, misalnya mencari kayu bakar dalam hutan, memasak, dan bahkan kadang pekerjaan tersebut tidak terwujud, seperti kegiatan mengasuh anak. Selain itu, apabila seorang perempuan bekerja di ladang atau melakukan kegiatan usaha milik keluarga, perempuan tidak mendapatkan upah. Ini belum termasuk kaum perempuan yang bekerja waktu dalam kegiatan-kegiatan usaha keluarga.

Kaum laki-laki yang menjadi kepala keluarga praktis mengendalikan seluruh hasil panen, termasuk uang hasil penjualannya, meskipun sebenarnya panen itu tercipta antara lain berkat kerja keras istrinya. Dalam budaya banyak, partisipasi kaum perempuan secara signifikan dalam penghasilan rumahtangga kurang bisa diterima secara sosial, dan karenanya hasil kaum perempuan tetap tidak nampak atau kurang diperhatikan. Hal ini merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan terus bertambahnya status ekonomi perempuan yang rendah, yang selanjutnya semakin membatasi kontrol perempuan terhadap tingkat penghasilan atau sumber-sumber daya ekonomi keluarga.

Kebijakan-kebijakan pembangunan yang diberlakukan di negara-negara berkembang tiap kali juga memperlebar jurang kesenjangan produktivitas antara kaum laki-laki dan perempuan, dan dengan sendirinya akan memburuk ketimpangan pendapatan anatara keduanya, sekaligus memperparah status ekonomi ekonomi kemiskinan perempuan di kalangan rumahtangganya. Mengingat program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah selama ini lebih tertuju kepada kaum laki-

laki saja, maka berbagai bentuk ketimpangan yang diderita oleh kaum perempuan cenderung parah.

Di daerah perkotaan program pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan potensi warga dalam memperoleh penghasilan dan kesempatan kerja di sektor formal juga lebih banyak ditunjukkan kaum laki-laki. Sementara itu program-program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian juga lebih terarah kepada jenis-jenis tanaman yang biasa ditangani oleh kaum laki-laki saja. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa upaya-upaya pembangunan seperti itu bukan hanya akan meningkatkan beban kerja kaum perempuan, tetapi juga mengurangi sumber-sumber daya rumah tangga yang ada di bawah kontrol perempuan. Sebagai konsekuensinya, posisi ekonomi dari kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi tanggungannya menjadi semakin rentan.

Kenyataan bahwa kesejahteraan perempuan dan anak-anak sangat dipengaruhi oleh rancangan kebijakan ekonomi pemerintah yang menggaris bawahi pentingnya memasukkan kaum perempuan ke dalam berbagai program pembangunan. Guna memperbaiki taraf hidup penduduk termiskin, peran ekonomi kaum perempuan harus diperhitungkan. Bertolak dari hal tersebut, maka peningkatan kesejahteraan keluarga hanya bisa diharapkan setelah adanya program-program pembangunan yang secara nyata akan mampu meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja di sektor formal, serta dalam pengembangan pertanian. Pemerintah juga dituntut untuk membuka akses

yang sama besar kepada kaum perempuan dalam program-program pendidikan, bidang pelayanan sosial, penyediaan kesempatan kerja, dan kesejahteraan sosial. Sektor-sektor lapangan kerja informal, kaum perempuan banyak berkiprah, juga perlu dilegalisasikan agar status ekonomi kaum perempuan benar-benar terangkat.

Konsekuensi atas rendahnya status ekonomi kaum perempuan, baik secara relatif maupun absolut, megandung berbagai implikasi etis dan ekonomi berjangka panjang. Setiap proses pertumbuhan ekonomi yang gagal memperbaiki kondisi kesejahteraan perempuan dan anak-anak, berarti telah gagal pula mencapai salah satu dari tujuan-tujuan utama pembangunan. Dalam jangka pajang, rendahnya status ekonomi perempuan tersebut pada gilirannya akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kaitanya ini tidaklah mengherankan, jika diingat bahwasanya kondisi kesejahteraan dan tingkat pendidikan anak-anak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kondisi kesejahteraan sang ibu, bukannya sang ayah.

Investasi sumber daya manusia hanya akan berhasil diteruskan ke generasi mendatang jika menyertakan upaya-upaya perbaikan status dan kesejahteraan perempuan ke alam proses pertumbuhan. Karena sumber daya manusia itu sendiri mungkin merupakan syarat penting bagi terciptanya proses pertumbuhan yang berkesinambungan, maka pendidikan dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan serta status ekonomi perempuan jelas

merupakan suatu faktor yang sangat penting demi tercapainya berbagai pembangunan jangka panjang.

## 2. Etnik Minoritas, Penduduk Pribumi, dan Kemiskinan

Generalisasi terakhir dari situasi kemiskinan negara-negara berkembang adalah bahwa kemiskinan banyak diderita oleh etnik minoritas dan penduduk pribumi. Sekitar 40 persen dari seluruh negara-negara di dunia ini memiliki lebih dari lima etnik, salah satu diantaranya seringkali mengalami berbagai bentuk diskriminasi sosial, politik, maupun ekonomi yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik-konflik domestik dan bahkan perang saudara bersumber dari persepsi memperebutkan sumber daya dan lapangan kerja yang terbatas.

Meskipun data rinci mengenai kemiskinan relatif yang diderita oleh etnik minoritas dan penduduk pribumi sulit diperoleh (karena pertimbangan-pertimbangan politik, hanya sedikit sekali negara yang bersedia mengangkat masalah ini), para peneliti kini mulai berhasil mengumpulkan data-data tentang penduduk pribumi di Amerika Latin. Hasilnya secara jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk pribumi itu sangat miskin dan mengalami malnutrisi, buta huruf, dalam lingkungan kesehatan yang buruk, serta menganggur. Sebagai contoh, para peneliti menemukan bahwa Meksiko, lebih dari 80 persen penduduk pribuminya adalah kaum miskin, padahal hanya 18 persen dari penduduk nonpribumi di negara yang masih bergulat dengan kemiskinan.

### **2.1.1.5. Kemiskinan Perkotaan dan Kemiskinan Pedesaan**

Berdasarkan daerah tempat tinggal penduduk miskin maka kemiskinan dibagi menjadi kemiskinan pedesaan (*Rural Poverty*) dan kemiskinan perkotaan (*Urban Poverty*). Jika kemiskinan pedesaan cenderung merupakan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, maka kemiskinan perkotaan dapat didefinisikan sebagai kemiskinan yang diakibatkan oleh berbagai dimensi (multi dimensi). Kemiskinan kota mempunyai warna tersendiri bila dibandingkan dengan kemiskinan desa, karena kompleksitas kemiskinan kota yang terdapat pada individu atau kelompok masyarakat miskin di kota lebih tinggi dibandingkan dengan kemiskinan desa. Contoh, tingginya persaingan hidup, beragamnya aktivitas penduduk kota, tuntutan agar dapat survive, dan sebagainya di kota lebih beragam dibandingkan di desa (BPS, 2007).

Beberapa dimensi di dalam kemiskinan perkotaan meliputi tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan atau ketidak-amanan individu dan tempat tinggal, dan ketidak berdayaan.

Shengen Fan (2002) pada BPS (2007) melakukan analisa mengenai dampak dari riset pertanian terhadap penurunan kemiskinan perkotaan di India. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa investasi dalam riset pertanian mampu meningkatkan produksi pertanian yang peningkatan itu akan berdampak terhadap penurunan harga makanan/bahan makanan. Hal ini akan menguntungkan penduduk miskin di perkotaan karena mereka biasanya menggunakan 50%-80% dari pendapatannya untuk

makanan/bahan makanan. Sehingga penurunan harga makanan akan mengurangi pengeluaran mereka selanjutnya akan berdampak pada turunnya angka kemiskinan.

### **2.1.2. Teori Pekerja Wanita**

Anwar (1991) dalam Sumarsono (2013) berpendapat bahwa perubahan-perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan mempunyai pengaruh besar terhadap peran serta wanita dalam angkatan kerja. pada tahap awal pelaksanaan pembangunan lapangan kerja disektor pertanian dan sektor tradisional lainnya akan berkurang lebih cepat daripada peningkatan lapangan kerja di sektor modern. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja pada kalangan wanita, pada waktu yang bersamaan proses pembangunan dapat meningkatkan penghasilan keluarga, sehingga dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sebelumnya mendorong wanita bekerja. Kedua hal tersebut menyebabkan wanita memiliki kecenderungan keluar dari angkatan kerja dan akhirnya peran serta wanita dalam pembangunan khususnya dalam angkatan kerja mengalami penurunan. setelah pembangunan mencapai suatu tahap tertentu yang disertai adanya keinginan untuk menikmati kemewahan hidup sebagai hasil pembangunan, mendorong wanita untuk memasuki angkatan kerja dan akhirnya peran serta wanita di dalam kerja produktif akan meningkat.

Peran serta wanita dalam pembangunan sangat diperhatikan terutama dalam pembangunan keluarga. Wanita memiliki peran ganda yaitu disatu pihak dituntut untuk mengabdikan diri terhadap rumah tangganya, dilain

pihak wanita dituntut untuk berperan serta dalam pembangunan, motivasi kerja kerja bagi wanita Indonesia seperti wanita pedesaan bukanlah sekedar mengisi waktu luang, atau melanjutkan karier semata, tapi sungguh - sungguh untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Susanto, 1990).

## **2.2. Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1. Pengaruh Perempuan terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Tiga pendekatan kemiskinan dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab kemiskinan di kalangan perempuan. Ketiga pendekatan tersebut adalah pendekatan kultural, struktural, dan alamiah. Secara kultural, sebagian masyarakat Indonesia masih dipengaruhi secara kuat oleh budaya tradisional yang berideologi patriarki. Ketimpangan struktural berupa keterbatasan kaum perempuan untuk memperoleh akses ekonomi (misalnya bekerja untuk memperoleh penghasilan, bukan sekedar menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga), berorganisasi, dan sebagainya masih berlaku. Kemiskinan struktural berakces pada timbulnya kemiskinan kultural, dalam bentuk rendahnya pendidikan dan keterampilan sebagian besar perempuan, terutama di pedesaan. Kemiskinan alamiah menjelaskan adanya sebagian kaum perempuan yang bersikap pasrah terhadap posisi dirinya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, karena kaum perempuan menganggap demikianlah kodrat sebagai seorang perempuan. Fenomena kemiskinan alamiah ini tidak hanya dijumpai pada masyarakat pedesaan melainkan di perkotaan (Susiana, 2009).



Krisnawati (2016) menyatakan bahwa kemiskinan perempuan juga dapat ditelaah melalui dua hal. Pertama, perpektif ekonomi. Kemiskinan dan pemiskinan perempuan secara jelas terlihat dari sektor ekonomi. Perempuan yang hidup dalam kemiskinan selalu sulit untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi. Untuk bekerja kaum perempuan tidak diakui dan dihargai. Dalam bekerjapun, perempuan mendapat upah jauh lebih rendah dari apa yang diperoleh laki – laki. Seorang perempuan yang turut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dibandingkan laki laki dari kategori sama. Secara adil harus diakui perempuan dari berbagai belahan dunia memiliki jam kerja sekitar 30 – 35 persen lebih panjang daripada laki-laki untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, dibandingkan dengan laki-laki usia yang sama.

Kedua, perspektif politik, dalam dimensi ini perempuan tidak terwakili secara proporsioanal di antara kelompok miskin dan tidak memiliki kekuasaan. Kemiskinan perempuan ini antara lain kerentanan hidup (*vulnerability*), kesempatan dan suara (*voicelessnes and powerlessness*), serta didukung pemerintah yang sangat bias gender (*male-biased governance systems*). Dimensi kemiskinan gender, yaitu bias gender, mudah ditemui dalam kebijakan struktural, perbedaan efek kebijakan, dan dana yang tidak memadai untuk mendukung kebijakan yang memihak kaum perempuan.

Menurut Antari (2008), perempuan memiliki potensi besar dalam berkontribusi pada pendapatan keluarga. Hal ini karena perempuan juga

mempunyai kemampuan untuk bekerja di sektor publik. Selain fleksibilitas dan kemampuan perempuan dalam beradaptasi saat krisis ekonomi, perempuan lebih mempunyai inisiatif untuk menggantikan suaminya dalam mencari penghasilan yang menghadapi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan potensi yang ada pada perempuan dalam aktivitas ekonomi.

Secara kualitatif perempuan pedesaan telah melakukan banyak pekerjaan di sektor domestik maupun publik, tetapi perempuan masih terpinggirkan akibat kebijakan bias gender. Keterbatasan modal yang dimiliki perempuan, keterbatasan pendidikan, serta keterampilan memaksa perempuan harus bekerja dengan upah sangat rendah. Perempuan semakin kesulitan untuk meningkatkan sumber daya perempuan karena beban kerja yang harus ditanggung lebih berat, yaitu menyelesaikan tugas utama di rumah tangga, membantu mencari nafkah, dan melakukan kegiatan yang kurang memiliki nilai ekonomi (Hastuti, 2014).

### **2.2.2. Pengaruh Jam Kerja terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Menurut Noerdin (2006) alokasi waktu atau jam kerja pada perempuan lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki, namun secara ekonomi penghasilan laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut terjadi karena perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan yang produktif, reproduktif, dan fungsi-fungsi sosial di komunitas. Dalam bidang

ekonomi pekerjaan produktif yang dilakukan laki-laki dianggap sebagai “pekerjaan” karena dibayarkan secara uang dan memiliki jam kerja yang jelas. Sementara pekerjaan domestik yang dilakukan oleh perempuan tidak dikatakan sebagai pekerjaan karena tidak dibayar dan tidak menghasilkan uang, serta memiliki jam kerja yang tidak terbatas karena dikerjakan sepanjang waktu. Seperti pada penelitian Krisnawati (2016) yang mengatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan yang berarti semakin lama jam kerja perempuan berarti menandakan kecenderungan untuk berstatus miskin semakin rendah.

### **2.2.3. Pengaruh Lapangan Pekerjaan terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Salah satu karakteristik ketenagaakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumahtangga miskin dan tidak miskin dapat menggunakan lapangan usaha atau sektor yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga (Krisnawati, 2016). Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumahtangga. Profil orang miskin selalu melekat pada perempuan yang bekerja sektor informal. Salah satunya bekerja dalam pertanian seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, dan pencari kayu (BPS, 2008). Utomo (2013) pada penelitiannya juga mengatakan bahwa perempuan yang bekerja pada sektor pertanian cenderung lebih besar untuk mendapatkan status miskin.

Pertanian yang bekerja di sektor pertanian biasanya terikat dengan upah yang rendah. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam hal tersebut, perlu adanya strategi pekerjaan dan investasi pedesaan untuk ditujukan kepada perempuan dan memberikan perhatian yang lebih terhadap perusahaan, termasuk dampak dari strategi pekerjaan dan investasi baru tersebut terhadap peran dan status perempuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Suda, 2002).

#### **2.2.4. Pengaruh Status Pekerjaan terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Status pekerjaan juga dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga. Terdapat indikasi bahwa pekerjaan yang berstatus sebagai pengusaha akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerjaan yang hanya berstatus sebagai karyawan/buruh/pegawai (BPS, 2008). Banyaknya perempuan yang bekerja dalam sektor informal menjelaskan berbagai hal, seperti ketidakmampuan dalam sektor formal untuk memperluas lapangan pekerjaan dan menyerap angkatan kerja yang terus meningkat, penggunaan teknologi yang sederhana, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan, mudah untuk keluar masuk pasar, modal yang rendah, dan relatif sesuai dengan sektor informal dan pekerjaan rumah tangga (Suda, 2002). Seperti pada penelitiannya Krisnawati (2016) yang mengatakan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal cenderung berstatus tidak miskin jika dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di bidang formal.

Menurut Buvinic (1997) mengatakan bahwa mayoritas perempuan menerima upah yang rendah dalam hal bekerja karena adanya diskriminasi antara upah dan pekerjaan. Contohnya di Honduras, pengusaha kopi lebih memilih mempekerjakan perempuan dibandingkan laki-laki karena perempuan bersedia menerima upah yang rendah. Di negara miskin, pekerja perempuan merupakan pekerja yang paling dicari untuk posisi dengan upah yang rendah, sektor pertanian, industri skala mikro, pabrik tidak berbadan hukum, dan industri agrobisnis yang membayar pekerja secara musiman atau paruh waktu.

#### **2.2.5. Pengaruh Beban Tanggungan terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Rumahtangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumahtangga yang lebih banyak dibandingkan dengan rumahtangga tidak miskin., hal tersebut dikarenakan rumahtangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumahtangga miskin juga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan layanan kesehatan. Dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dengan jumlah anggota dalam rumahtangga yang besar dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan (BPS, 2008).

Rata-rata jumlah anggota rumahtangga miskin sekitar satu orang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota rumahtangga tidak miskin, baik perkotaan maupun di pedesaan. Hubungan jumlah anggota rumahtangga yang besar dengan kemiskinan bersifat memperkuat. Di sisi lain, rumahtangga miskin cenderung mempunyai anak yang banyak. Hal itu tidak lepas dari

anggapan bahwa anak merupakan jaminan orang tua masa depan. Namun dengan jumlah anak yang banyak cenderung menjadi miskin karena tingkat pendapatan tertentu harus digunakan untuk menghidupi lebih banyak anggota rumahtangga (TNP2K, 2010).

Nopriansyah et al (2015) juga mengatakan bahwa adanya hubungan positif antara jumlah anggota keluarga dengan kemiskinan dengan kata lain semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ditanggung maka semakin tinggi pula resiko menjadi miskin.

#### **2.2.6. Pengaruh Status Rumah Tangga terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Keterkaitan status rumah tangga dengan kemiskinan sangatlah penting, hal ini dikarenakan bahwa masih banyaknya perempuan yang menjadi kepala rumah tangga kemudian rendahnya kesempatan dan kapasitas perempuan dalam memiliki pendapatan sendiri, serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap penghasilan suami (Todaro & Smith 2006).

Peran perempuan sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga keluarga biasanya akan mengalami kendala dibandingkan dengan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan kodrat perempuan yang harus berperan ganda di dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus emlahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya (Utomo & Rahani, 2013).

### **2.2.7. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penentu Status Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Keterkaitan tingkat pendidikan dengan kemiskinan sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan pendidikan sangat berperan terhadap kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih berpeluang untuk tidak menjadi miskin. Menurut Krisnawati (2016) menyatakan bahwa dengan membangun pendidikan yang lebih baik akan melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan di negara tersebut. Hal tersebut juga didukung penelitiannya Javed (2011) yang mengatakan bahwa perempuan yang berpendidikan rendah lebih rentan keluarganya untuk menjadi miskin.

### **2.2.8. Pengaruh Kesehatan terhadap Status Penentu Ekonomi Kemiskinan Perempuan**

Lincoln (1999) menjelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja.

Woman Research Institute (2019) mengatakan bahwa berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh *Woman Research Institute* (WRI), hak-hak dasar yang paling dianggap penting karena kesalingterkaitan antar ke tiga hak dasar tersebut dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat miskin, khususnya perempuan untuk mentransformasikan aset produkti mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Penelitian Shiddiqoh

(2016) menyatakan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara layanan kesehatan dengan kemiskinan.

Menurut Javed (2011) mengemukakan bahwa, untuk meningkatkan kesehatan tidak hanya mengandalkan sistem perawatan primer saja, tetapi harus fokus pada kondisi ketimpangan pendapatan, seperti pemerataan distribusi pendapatan akan menyebabkan peningkatan taraf hidup penduduk secara besar melalui peningkatan kesehatan, gizi dan pendidikan yang akan menghasilkan peningkatan dalam efisiensi dalam produksi dan meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program ekonomi dan sosial di masyarakat

### 2.3. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Nopriansyah, Junaidi dan Etik Umiyati (2014)	Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi	Log Y = Kemiskinan X1 = Jenis Kelamin X2 = Pendidikan X3 = Pekerjaan X4 = Jumlah anggota	Analisis Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiko rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan lebih beresiko miskin bila dibandingkan dengan kepala rumah tangga berjenis laki-laki.</li> <li>- Variabel kemiskinan dan variabel pendidikan berhubungan negatif.</li> <li>- Resiko rumah tangga yang kepala rumah tangganya di sektor pertanian untuk menjadi miskin lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang bekerja bukan di sektor</li> </ul>



					<p>pertanian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan variabel kemiskinan dan jumlah anggota rumah tangga adalah positif.</li> </ul>
2.	Titis Krisnawati, Nyoman Mahendra Yasa 2016	Pengaruh Variabel Ekonomi dan Sosial Demografi terhadap Status Ekonomi Perempuan di Kabupaten Jembrana	Variabel Ekonomi (pendapatan, jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan) Variabel Sosial Demografi (daerah tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan)	Regresi Logistik	Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Ekonomi (pendapatan, jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan) Variabel Sosial Demografi (daerah tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap status ekonomi perempuan.
3.	Zahoor Hussain Javed and Ayesha Asif 2011	Female household and poverty: A case Study of Faisalabad District	$Y1 = \text{Log pendapatan bulanan keluarga}$ $X1 = \text{Usia Kepala}$ $X2 = \text{Pendidikan Kepala Rumahtangga}$ $X3 = \text{Jumlah anak}$ $X4 = \text{jumlah pencari nafkah}$ $X5 = \text{tempat tinggal}$ $X6 = \text{pekerjaan suami}$ $X7 = \text{status kepemimpinan}$	Regresi an biner analisis regresi logit	Hasil penelitian adalah variabel pendidikan, jumlah pencari nafkah, jumlah anak – anak, jenis pekerjaan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan bulanan keluarga.

4.	Sagung Antari 2008	The Analysis Of Several Influencing Factors To The Woman's Income (Mother Of Household) At Poor Family In Sesetan Village, South Denpasar Subdistrict, Denpasar City	Y = pendapatan perempuan X1 = umur X2 = pendidikan X3 = jenis pekerjaan X4 = fianancial capital	Regresi majemuk	Faktor umur, tingkat pendidikan, jam kerja, jumlah tanggungan keluarga dan modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perempuan pada keluarga miskin . faktor dominan yang mempengaruhi pendapatan keluarga miskin adalah jam kerja.
5.	Hasna Shiddiqoh 2016	Keterkaitan Antara Peranan Wanita Dengan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia	Y = Penduduk miskin X1 = Angkatan Kerja X2 = Tingkat Pendidikan X3 = upah X4 = Layanan Kesehatan	Analisis kuantitatif dan deskriptif. Metode panel data	Pekerja wanita, pendidikan dan layanan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Upah berpengaruh negatiftapi tidak signifikan.
6.	Agung Priyo Utomo dan Rini Rahani (2013)	Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita Kepala Rumah Tangga	Y = <i>Wealth Index</i> (Kemiskinan) X1 = Umur X2 = Tingkat Pendidikan X3 = Lapangan Pekerjaan	Analisis deskriptif dan Analisis Regresi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semakin tua usia KRT perempuan peluang rumah tangga tersebut untuk mendapatkan status miskin semakin kecil.</li> <li>- Semakin tinggi tingkat pendidikan KRT perempuan semakin kecil kecenderungan rumah tangga tersebut mendapat status miskin.</li> <li>- Rumah tangga dengan KRT perempuan yang bekerja di sektor pertanian lebih kecenderungan untuk mendapatkan status kekayaan yang rendah atau miskin.</li> </ul>

7.	Teddy Christianto Leasiwal (2013)	Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku	Y = Kemiskinan X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Pendapatan perkapita X3 = Paritas Daya Beli/PPP X4 = Inflasi X5 = TPT X6 = MYS X7 = AMH X8 = APK X9 = APM X10 = AHH X11 = Jumlah Sekolah SMA X12 = Jumlah Fasilitas Kesehatan	Menggunakan analisis data panel,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat enam variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yaitu sebagai berikut Daya Beli Masyarakat(DB), Inflasi(Inf), Rata-rata lama Sekolah (MYS), Angka Melek Huruf (AMH), dan Angka Partisipasi Kasar (APM), Angka Harapan Hidup (AHH)</li> <li>- Sedangkan variabel yang paling dominan mempengaruhi adalah Angka Harapan Hidup(AHH)</li> <li>- Karakteristik kemiskinan di provinsi Maluku memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lapangan pekerjaan sebagian besar pada sektor informal.</li> </ul>
8.	Haris Mendra dan Syamsul Amar (2016)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Rumahtangga di Kota Pariaman	Y = Status Kemiskinan X1 = Tingkat Pendidikan X2 = Status Pekerjaan X3 = Ukuran Keluarga	Analisis Logistic Regression Model	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemiskinan di Kota Pariaman dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status pekerjaan dan ukuran keluarga suatu rumahtangga.</li> <li>- Jumlah anggota rumahtangga yang besar menyebabkan semakin besar juga konsumsi rumahtangga, jika tidak diiringi dengan tambahan penghasilan maka akan bisa menyebabkan tidak</li> </ul>

					<p>terpenuhi kebutuhan lainnya dari anggota rumahtangga, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan lainnya ini menyebabkan rumahtangga menjadi miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status pekerjaan kepala keluarga, semakin formal status pekerjaan kepala keluarga suatu rumahtangga semakin kecil peluang rumahtangga tersebut untuk berada pada status miskin.</li> <li>- Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga suatu rumahtangga semakin kecil kemungkinan rumahtangga tersebut untuk berada pada status miskin.</li> </ul>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 2.4. Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini antara yang lain :

1. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya oleh Utomo (2013) terletak pada obyeknya peneliti sebelumnya meneliti di Indonesia pada taun 2013 dengan variabel bebasnya umur, tingkat pendidikan dan latar belakang sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Kota Semarang tahun 2017 dengan menggunakan variabel bebas jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, anggota rumah tangga, status rumah tangga, tingkat pendidikan, dan kesehatan. Selain itu terletak pada objek ada penelitian tersebut fokus pada

perempuan janda atau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yaitu sama sama meneliti tentang kemiskinan perempuan dan peran perempuan bekerja dalam mengurangi kemiskinan dengan menggunakan alat analisis logistik bineri.

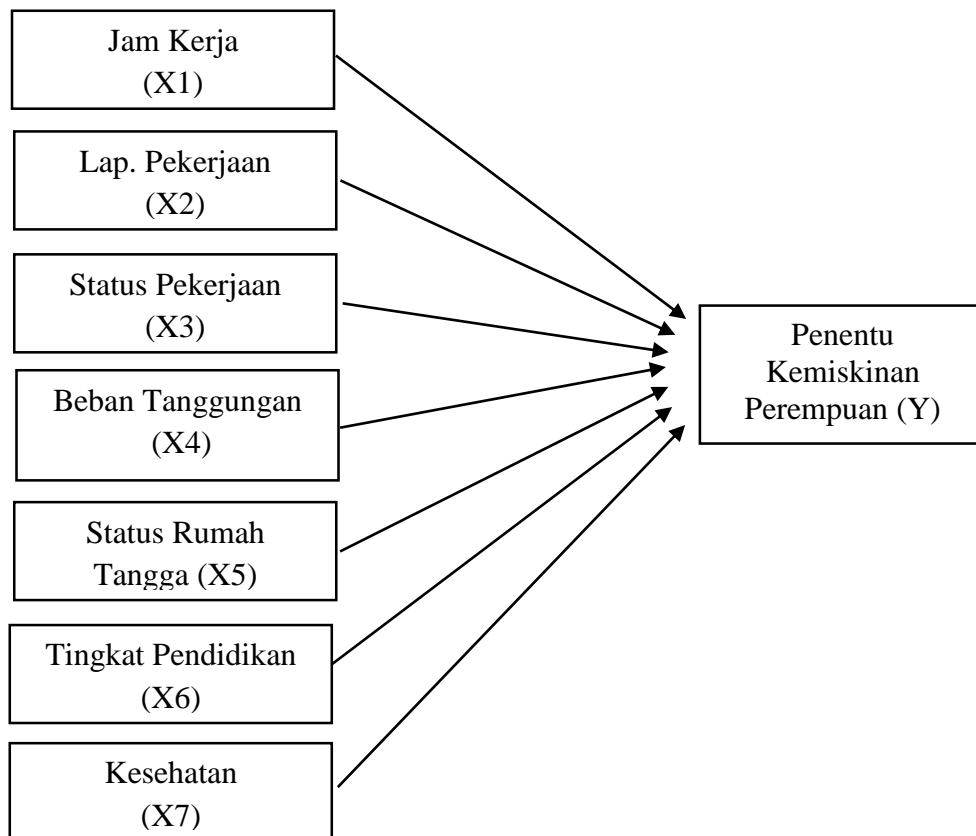
2. Perbedaan selanjutnya pada penelitian Krisnawati (2016) penelitian ini dilakukan di Jember pada tahun 2013. Dengan variabel bebas pendapatan, jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, daerah tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada penelitian tersebut dilihat secara keseluruhan sedangkan pada penelitian ini tingkat pendidikan dilihat secara tingkatan. Persamaan pada penelitian ini sama sama menggunakan alat analisis logistik bineri SPSS.

## **2.5. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2009). Kerangka berfikir didasarkan pada teori-teori yang diambil sebagai dasar pemecahan masalah dalam penelitian. Kemiskinan merupakan salah satu masalah cukup besar yang menjadi pusat perhatian pemerintah negara manapun termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kota Semarang merupakan penyumbang terbanyak se Kota di Jawa Tengah. Menurut BPS (2007) menyatakan bahwa kemiskinan di Kota lebih kompleks dibandingkan dengan kemiskinan di desa.

Berdasarkan teori yang dikatakan oleh Todaro (2006) menyatakan bahwa mayoritas penduduk miskin di dunia termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia ini adalah kaum perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan

yang selalu dianggap rendah, sebagai contohnya perempuan bahwa masih banyak terdapat perempuan yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar atau tidak mendapatkan upah. Selain itu jam kerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, dan menerima pendapatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki bahkan ada yang tidak dinilai dengan uang seperti pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Kemudian lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang rendah, dan faktor lainnya. Adapun skema kerangka pemikiran penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Peneliti

## 2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap masalah yang merupakan praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1.  $H_1$  : Terdapat pengaruh negatif signifikan antara jam kerja terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
2.  $H_2$  : Terdapat pengaruh negatif signifikan antara lapangan pekerjaan terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
3.  $H_3$  : Terdapat pengaruh positif signifikan antara status pekerjaan terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
4.  $H_4$  : Terdapat pengaruh positif signifikan antara beban tanggungan terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang
5.  $H_5$  : Terdapat pengaruh positif signifikan antara status rumah tangga terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang
6.  $H_6$  : Terdapat pengaruh negatif signifikan antara tingkat pendidikan terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang.
7.  $H_7$  : Terdapat pengaruh negatif signifikan antara kesehatan terhadap penentu kemiskinan perempuan di Kota Semarang.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian secara umum sebagai berikut:

1. Jam kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status ekonomi kemiskinan perempuan di Kota Semarang dengan arah negatif. Nilai *odd ratio* sebesar 0,576 yang berarti perempuan yang bekerja lebih 35 jam dalam seminggu untuk berstatus miskin sebesar 0,576 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang bekerja selama kurang dari 35 jam dalam seminggu.
2. Lapangan pekerjaan (agrikultur, industri, dan jasa) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap status ekonomi perempuan, karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  (5%). Masing masing memiliki nilai sebesar 0,171 (agrikultur), 0,178 (industri) dan 0,235 (jasa). Dengan demikian lapangan pekerjaan tidak mempengaruhi perempuan berstatus miskin di Kota Semarang tahun 2017).
3. Status pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status ekonomi perempuan di Kota Semarang dengan arah positif. Nilai *odd ratio* sebesar 1,530 yang berarti kecenderungan perempuan berusia 15 tahun ke atas dengan status istri maupun janda dan yang bekerja di sektor informal untuk berstatus miskin sebesar 1,530 kali dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di sektor formal.



4. Beban tanggungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status ekonomi perempuan di Kota Semarang dengan arah positif. Nilai *odd ratio* sebesar 0,231 yang berarti setiap penambahan 1 beban tanggungan, maka akan terjadi kemungkinan perempuan berusia 15 tahun ke atas dengan status istri maupun janda dan yang bekerja berstatus miskin akan bertambah 0,231 kali.
5. Status rumah tangga perempuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status ekonomi perempuan di Kota Semarang dengan arah positif. Nilai *odd ratio* sebesar 3,730 yang berarti setiap penambahan 1 perempuan dengan status kepala keluarga, maka akan terjadi kemungkinan perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja dan berstatus kepala keluarga akan berstatus miskin, bertambah sebesar 3,730 kali.
6. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status ekonomi perempuan di Kota Semarang dengan arah negatif. Nilai *odd ratio* sebesar 0,234 berarti kecenderungan perempuan berusia 15 tahun ke atas dengan status istri maupun janda yang bekerja dengan pendidikan semakin tinggi untuk berstatus miskin sebesar 0,234 kali lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang berpendidikan rendah, hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kecenderungan untuk berstatus miskin rendah.

7. Kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status ekonomi perempuan dengan arah negatif. Nilai odd ratio sebesar 0,679 berarti kecenderungan perempuan berusia 15 tahun ke atas dengan status istri maupun janda yang bekerja dalam keadaan sehat untuk berstatus miskin sebesar 0,679 lebih rendah untuk berstatus miskin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja dengan keadaan sehat maka kecenderungan untuk berstatus miskin semakin rendah.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Perempuan usia 15 tahun ke atas dengan status istri maupun janda yang bekerja yang berstatus miskin di Kota Semarang didominasi oleh perempuan dengan pendidikan yang rendah, dengan adanya kaitan tersebut diharapkan untuk meningkatkan atau mengkaji kembali kebijakan yang sudah dijalankan, misalnya seperti meningkatkan subsidi kualitas layanan pendidikan bagi perempuan yang sudah berumur diatas 15 tahun ke atas.
2. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa status pekerjaan sektor formal berpengaruh positif terhadap penentu status ekonomi perempuan. Dengan hal tersebut perlunya menciptakan lapangan pekerjaan di sektor formal bagi perempuan serta meningkatkan akses kaum perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak di sektor formal. Selain itu fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan di setiap

tempat kerja sehingga mampu mendukung atau menjamin kesehatan para pekerja sehingga mampu bekerja dengan baik.

3. Penelitian juga menunjukkan status rumah tangga berpengaruh positif. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa rumah tangga yang dikepalai perempuan cenderung berstatus miskin. Oleh karena itu kebijakan yang harus dijalankan maupun ditingkatkan kembali seperti jaminan sosial, program raskin dan bantuan tunai bagi perempuan yang menjadi kepala rumahtangga.
4. Selain itu beban tanggungan juga berpengaruh positif , semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka kecenderungan perempuan untuk bersatatus miskin semakin meningkat, hal tersebut perlu digalakan kembali program keluarga berencana terutama bagi perempuan dengan status miskin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdourahman, O. I. (2010). Time Poverty: A Contributor to Women's Poverty? *Journal Statistique Africain*, 1(11), 287–307. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199468256.003.0008>
- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265–283. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13022>
- Antari, S. (2008). The Analysis of Several Influencing Factors to the Woman's Income (Mother of Household) at Poor Family in Sesetan Village, South Denpasar Subdistrict, Denpasar City. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*, 1(1), 129–134.
- Auerbach, M. P. (2011). *Culture Theory of Poverty*. California: Salem Press.
- BPS.(2013). Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2013. Semarang: Badan Pusat Statistika
- \_\_\_\_.(2014). Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2013. Semarang: . Badan Pusat Statistika
- \_\_\_\_.(2015). Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2013. Semarang: Badan Pusat Statistika.
- \_\_\_\_.(2016). Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2013. Semarang: . Badan Pusat Statistika
- \_\_\_\_.(2017). Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah 2013. Semarang: Badan Pusat Statistika.
- BPS.(2013). Kota Semarang dalam Angka 2013. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_.(2014). Kota Semarang dalam Angka 2013. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_.(2015). Kota Semarang dalam Angka 2013. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_.(2016). Kota Semarang dalam Angka 2013. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_.(2017). Kota Semarang dalam Angka 2013. Kota Semarang: Badan Pusat Statistik.
- BPS.(2017). Statistik Gender Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik: Jakarta

- BPS. (2007). Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan Studi Kasus di Jakarta Utara. In *Badan Pusat Statistik*. Jakarta.
- BPS. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Badan Pusat Statistika. Jakarta
- Buvinic, M. (1997). Women in Poverty: A New Global Underclass. *Foreign Policy*, (108), 38–53.
- Databoks. (2016). Laki-laki Mendominasi Sektor Kerja Industri. Retrieved from Databoks.Katadata.Co.Idwebsite:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/31/laki-laki-mendominasi-sektor-kerja-industri>
- Djunaedi. (2018). Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 5(1), 19–26. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/administrare/index>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan E-Views 8*. Ssemarang: ISBN, UNDIP.
- Haryanto, S. (2008). Peran Aktif Wanita Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus Pada Wanita Pemecah Batu Di Pucanganak Kecamatan Tugu Trenggalek. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 216–227. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hastuti. (2014). Peran Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Wisata Gabungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 151–162.
- Indraswari. (2009). Perempuan dan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial*, 14(2), 40–52.
- Javed, Z. H., & Asif, A. (2011). Female households and poverty: A case study of Faisalabad District. *International Journal of Peace and Development Studies*, 2(2), 37–44.
- Krisnawati, T., & Yasa, N. M. (2016). Pengaruh Variabel Ekonomi Dan Sosial Demografi Terhadap Status Ekonomi Perempuan Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 1–11.
- Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.
- Leasiwal, T. C. (2013). Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku. *Cita Ekonomika Jurnal Ekonomi*, VII(2), 1–26.
- Lincoln, A. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. In *Bpfe*. Yogyakarta: BPF.
- Mendra, H., & Amar, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Rumah tangga Di Kota Pariaman. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 1–15.
- Noerdin, E. (2006). Strategi Mengentaskan Kemiskinan Berbasis Gender. In *Potret Kemiskinan Perempuan* (p. Hal 1-38).
- Nopriansyah, Junaidi, & Etik Umiyati. (2015). Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 119–128. Retrieved from <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2268>
- Prasetyowati, A. (2010). Pengaruh Faktor-faktor Ekonomi dan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan. *E-Journal Unsri*, 1–23. Retrieved from <https://ejournal.unsri.ac.id>
- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK*, 8(1), 100–107. <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>
- Sa'diyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economis*, 1(1), 1–11.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shiddiqoh, H. (2016). Keterkaitan antara peranan wanita dengan tingkat kemiskinan di indonesia hasna shiddiqoh. *Institute Pertanian Bogor*, 1(1), 13–46.
- Suda, C. (2002). Gender Disparities in the Keyan Labour Marker: Implications For Poverty Reduction. *Nordic Journal of African Studies*, 11(3), 301–321.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Susiana, S. (2009). *Krisis Ekonomi Global dan Feminisasi Kemiskinan* (D. R. S. K. E. G. dan T. D. P. Kemiskinan, Ed.). Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jendral DPR RI.

- TNP2K. (2010). *Penanggulangan Kemiskinan: Situasi Terkini, Target Pemerintah, dan Program Percepatan* (p. 119). p. 119. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Todaro, M. P., & Stephen C, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan (Terjemahan) Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, P. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*. United Kingdom: Erlangga.
- Usman, Sianga, B. M., & Siregar, H. (2002). Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Sosio Economic of Agriculture and Agribisnis*, 6(2), 1–17.
- Utomo, A. P., & Rahani, R. (2013). Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita Kepala Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Sosial San Ilmu Politik*, 17(November), 192–206.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomoe 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan. Jakarta: Sekretaris Negara Repblik Indonesia.
- WRI. (2019). Perempuan, Kemiskinan, Akses dan Pelayanan Kesehatan. *Woman Research Institute*. Retrieved from <https://www.wri.or.id/editorial/15-perempuan-kemiskinan-akses-dan-pelayanan-kesehatan.html#.XaHIXFUzBIU>